



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019



Sapeu Keun Saho Langkah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, puji syukur kehadirat Allah *subhanahuwata'ala*, atas rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagai media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya (RPJMK) Tahun 2018-2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, dalam penyajian ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan adanya masukan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan laporan ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya atas dedikasi dan upayanya dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang baik dalam rangka memenuhi ekspektasi publik atas pelayanan pemerintah yang transparan dan berorientasi kinerja.

Demikian, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di tahun-tahun mendatang. Terima kasih.

Blangpidie, 20 Maret 2020

BUPATI ACEH BARAT DAYA

AKMAL IBRAHIM, S.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
SURAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya	2
1.2.1. Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.	2
1.2.2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah	9
1.3. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya	10
1.3.1. Letak Geografis	10
1.3.2. Administratif	11
1.3.3. Demografi	12
1.3.3.1 Kependudukan	12
1.4. Gambaran Umum Perekonomian	15
1.4.1. Tinjauan Ekonomi	15
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	21
1.6. Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN	26
2.1. Visi dan Misi	26
2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	27
2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018 - 2022	28
2.3. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2019	30

2.4. Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya	
Tahun 2019	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Metode Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja	40
B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya..	41
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun Lalu dan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	95
D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional	102
E. Analisis Capaian Kinerja.....	105
F. Akuntabilitas Keuangan.....	105
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Langkah-Langkah Perbaikan	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan PP 18 Tahun 2016 dan Permendagri No 95 Tahun 2016 serta Qanun Nomor 5 Tahun 2017	3
Tabel 1.2	Komposisi PNS berdasarkan Golongan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2019	9
Tabel 1.3	Komposisi Jabatan/Esselonering di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2019	9
Tabel 1.4	Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2019	10
Tabel 1.5	Gambaran Umum Wilayah Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	11
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kondisi 31 Desember 2019.....	12
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk per Usia Penduduk dan <i>Sex Ratio</i> Kondisi 31 Desember 2019	14
Tabel 1.8	Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB seri 2010 Kabupaten Aceh Barat Daya atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)	16
Tabel 1.9	Pendapatan Regional dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar Harga Berlaku (Hb) maupun atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	17
Tabel 1.10	Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2018 atas Dasar HargaBerlaku 2000 dan 2010 (Juta Rupiah)	18
Tabel 1.11	Pembagian Zona Kawasan Industri Di Kabupaten Aceh Barat Daya	20
Tabel 2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 – 2022	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Bupati Aceh Barat Daya	32
Tabel 2.3	Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	39
Tabel 3.1	Data Jenis Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.....	43
Tabel 3.2	Kondisi Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam Tahun 2019	44
Tabel 3.3	Daftar Kasus Jarimah yang Telah <i>Inkracht</i> di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2018 – 2019.....	45
Tabel 3.4	Jumlah Dayah yang Terakreditasi Tahun 2019	46
Tabel 3.5	Daftar Hafidz dan Hafidzah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	48
Tabel 3.6	Daftar Sanggar Seni yang Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	49
Tabel 3.7	Perkembangan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019.....	53
Tabel 3.8	Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 berdasarkan Jenis Pendapatan	53

Tabel 3.9	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perbandingan Rata Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019	54
Tabel 3.10	Tingkat Maturitas SPIP.....	55
Tabel 3.11	Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	59
Tabel 3.12	Produksi Perikanan (Laut, Budidaya dan Perairan) di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	60
Tabel 3.13	Kondisi Kelompok Koperasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	61
Tabel 3.14	Jumlah BUMG yang Mengelola Usaha Pasca Panen di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	63
Tabel 3.15	Destinasi Wisata Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	65
Tabel 3.16	Kondisi Jalan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Kewenangan	68
Tabel 3.17	Luas Lahan Sawah Berdasarkan Klasifikasi Irigasi Per Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya	69
Tabel 3.18	Bencana Alam dan Jumlah Kerusakan yang Ditimbulkan Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	72
Tabel 3.19	Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) Usia SD/MI periode 2015 – 2019	74
Tabel 3.20	Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) Usia SMP/MTs periode 2015 – 2019	75
Tabel 3.21	Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia SD/MI periode 2015 – 2019	76
Tabel 3.22	Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) Usia SMP/MTs periode 2015 – 2019	76
Tabel 3.23	Realisasi Angka Melek Huruf.....	77
Tabel 3.24	Daftar Sekolah Yang Telah Menerapkan Pendidikan Islami di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2018/2019 Ganjil	78
Tabel 3.25	Daftar Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019.....	80
Tabel 3.26	Daftar Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019	81
Tabel 3.27	Umur Harapan Hidup Di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	83
Tabel 3.28	Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	84
Tabel 3.29	Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	85
Tabel 3.30	Kasus Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	86
Tabel 3.31	Jumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya yang Telah Terakreditasi Sampai Tahun 2019	88
Tabel 3.32	Jumlah Wirausaha Muda Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	91
Tabel 3.33	Cabang Olahraga Berprestasi Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	92

Tabel 3.34	Daftar Organisasi Kepemudaan Aktif Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.....	93
Tabel 3.35	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) Tahun 2019.....	106
Tabel 3.36	Realisasi Anggaran Belanja Aceh Barat Daya Tahun 2019.....	107
Tabel 3.37	Jumlah dan Realisasi APBK dalam Kurun Waktu 2015 – 2019 ...	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya.....	11
Gambar 3.1	Penyaluran ZIS Secara Simbolis	43
Gambar 3.2	Eksekusi Cambuk terhadap Salah Satu Terpidana Pelanggar Syari'at Islam Tahun 2019.....	44
Gambar 3.3	Kegiatan Pembinaan terhadap Hafidz dan Hafidzah Tahun 2019	47
Gambar 3.4	Sesi Foto Bersama Menpan RB, Gubernur Aceh dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya dan Pejabat Lainnya dalam Penyerahan Nilai SAKIP	51
Gambar 3.5	Temu Lapang Tanam Serentak Tahun 2019 Di Gampong Blang Dalam Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya	57
Gambar 3.6	Panen Raya MT Gadu 2019 Di Gampong Pisang Kec. Setia	57
Gambar 3.7	Pengadaan Alat Tangap Nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2019	59
Gambar 3.8	Penyerahan Bantuan Masa Panik Korban Bencana Alam Tahun 2019 oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya 2016 – 2019.....	19
Grafik 1.2	Tahapan-Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	24
Grafik 3.1	Kasus Pelanggaran Syari’at Islam yang Telah Dinyatakan <i>Inkracht</i> periode 2017 – 2019	45
Grafik 3.2	Perolehan Nilai AKIP Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019.....	51
Grafik 3.3	Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 – 2019	54
Grafik 3.4	Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2008 - 2019.....	66
Grafik 3.5	Angka Partisipasi Murni SD/MI Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019.....	74
Grafik 3.6	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	75
Grafik 3.7	Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019.....	76
Grafik 3.8	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	77
Grafik 3.9	Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019.....	78
Grafik 3.10	Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019	81
Grafik 3.11	Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019.....	81
Grafik 3.12	Umur Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019	83
Grafik 3.13	Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 - 2019.....	84
Grafik 3.14	Angka Kematian Ibu Melahirkan Di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017 - 2019.....	86
Grafik 3.15	Peningkatan/Penurunan Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 - 2019	87

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Persentase Sanggar Seni Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	50
Diagram 3.2	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.....	52
Diagram 3.3	Persentase Perbandingan Koperasi Aktif dan Tida Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019	62
Diagram 3.4	Persentase Perbandingan Lembaga Pendidikan yang Telah Menerapkan Pendidikan Islami dan yang Belum Menerapkan Pendidikan Islami Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya	80



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
INSPEKTORAT
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya
BLANGPIDIE 23764

PERNYATAAN REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Blangpidie, 03 April 2020
Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya

Drs. H. SAID JAILANI
Pembina Utama Muda/NIP. 19631105 199003 1 004



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017 – 2022 yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 – 2022 merupakan acuan yang harus dijadikan landasan dalam menetapkan setiap prioritas program pembangunan daerah 5 tahun mendatang sesuai dengan masa jabatan kepala daerah.

Dalam RPJMK tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan kewenangan telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja utama daerah yang harus dicapai dalam kurun waktu 2018 – 2022.

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Aceh Barat Daya terus berpacu untuk meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun pembangunan fisik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas SDM dimaksud. Sebagai daerah agraris dengan potensi alam yang membentang baik itu di sektor pertanian, kehutanan, perkebunan bahkan kelautan, menjadikan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai daerah yang telah memiliki basis ekonomi yang baik untuk dapat terus dikembangkan.

Pada tahun 2019, melalui Qanun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019, telah menetapkan secara umum program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Adapun anggaran yang ditetapkan untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah sebesar Rp1.140.194.835.313,55 dengan realisasi sebesar Rp1.002.636.620.119,95 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp137.558.215.193,60 atau 12,07%.

Setiap keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tidak terlepas dari dukungan dari setiap komponen dan *stakeholder* yang ada di daerah ini. Dukungan tersebut baik dalam bentuk kritikan yang konstruktif maupun dalam bentuk ide kreatif serta dalam bentuk sumbangan tenaga menjadi modal bagi pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan pembangunan dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada demi mewujudkan Aceh Barat Daya yang sejahtera dan islami.

BABI PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dilakukan penataan pada tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pada penyusunan laporan kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, ketiga pilar tersebut penting diterapkan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penyusunan laporan dimaksud.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan atau kebebasan bagi publik untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atas pelaksanaan program/kegiatan serta hasil-hasil yang dicapai dapat disampaikan secara terbuka kepada yang membutuhkan informasi tersebut.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Dari uraian di atas, maka dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi/program suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta diperjanjikan sebelumnya dan disampaikan secara periodik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hal ini diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.

Penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 merupakan alat kendali penilaian kinerja secara kualitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang disusun dengan berdasarkan pada :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya

1.2.1. Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebuah lembaga atau tempat berkumpulnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu wilayah atau bagian-bagiannya. Atau dengan kata lain bahwa pemerintah itu merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi pemerintahan itu sendiri.

Organisasi pemerintah sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota, yang menyatakan bahwa daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah dan masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu melaksanakan urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan umum adalah urusan yang menjadi urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan urusan pemerintahan konkruen yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menindaklanjuti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas :

- a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
- b) Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mengeluarkan Perda (Qanun) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 1.1
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dan
Permendagri Nomor 95 Tahun 2016
serta Qanun Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017

No	Nomenklatur Organisasi Perangkat Kabupaten		Tipe Organisasi		Keterangan
	2016	2017	2016	2017	
1	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	A	A	Mendapatkan penambahan tugas pokok dan fungsi baru yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yaitu urusan pemerintahan sekretariat daerah. Pada tahun 2017 sekretariat daerah mendapatkan penggabungan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang ditempatkan pada Bagian Kominfo, Persandian dan Protokol Setdakab. Aceh Barat Daya
2	Sekretariat DPRK	Sekretariat DPRK	C	C	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan aceh yaitu urusan pemerintahan Sekretariat DPRK
3	Inspektorat	Inspektorat	A	A	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan, melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh dan urusan pemerintahan Inspektorat
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	B	Mendapatkan penambahan tugas Pokok dan fungsi baru yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Urusan Pemerintahan Pendidikan. Pada tahun 2017, Dinas

No	Nomenklatur Organisasi Perangkat Kabupaten		Tipe Organisasi		Keterangan
	2016	2017	2016	2017	
					Pendidikan mendapatkan penggabungan dari Dinas Kebudayaan dan Olahraga sehingga terjadi perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe B
5	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	B	B	Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B	B	Hasil peleburan dari Dinas Pekerjaan Umum dengan melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar urusan pemerintahan pekerjaan umum dan penataan ruang
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	B	B	Hasil peleburan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dengan melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan perumahan rakyat serta kawasan permukiman
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	C	C	Melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
9	Dinas Sosial	Dinas Sosial	B	B	Hasil peleburan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang sosial
10	Dinas	Dinas	B	B	Melaksanakan urusan

No	Nomenklatur Organisasi Perangkat Kabupaten		Tipe Organisasi		Keterangan
	2016	2017	2016	2017	
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pendudukan dan Pencatatan Sipil			wajib non-pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	A	A	Melaksanakan urusan wajib non-pelayanan dasar penggabungan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	B	B	Mendapatkan penambahan tugas pokok dan fungsi baru yang melaksanakan urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pada tahun 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan penggabungan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nama nomenklatur baru yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	B	B	Melaksanakan urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan

No	Nomenklatur Organisasi Perangkat Kabupaten		Tipe Organisasi		Keterangan
	2016	2017	2016	2017	
					pemerintahan perhubungan (Wil. Daratan)
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	B	B	Melaksanakan gabungan urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan wajib pilihan serta urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian serta perdagangan
15	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	B	A	Mendapatkan penambahan tugas pokok dan fungsi baru yang digabungkan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan wajib pilihan serta urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian.
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	C	B	Melaksanakan urusan wajib pilihan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip	C	C	Melaksanakan urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan pemerintahan perpustakaan dan kearsipan
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A	A	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan urusan pemerintahan perencanaan, penelitian dan pengembangan
19	Badan Keuangan	Badan Keuangan	B	B	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dan urusan

No	Nomenklatur Organisasi Perangkat Kabupaten		Tipe Organisasi		Keterangan
	2016	2017	2016	2017	
					pemerintahan keuangan
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	B	Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan urusan pemerintahan bidang kepegawaian
21	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			Melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh serta urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat islam
22	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama			Melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh serta urusan pemerintahan pada peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh
23	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Sekretariat Majelis Adat Aceh			Melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh serta urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam
24	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			Melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh serta urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas
25	Sekretariat Baitul Mal	Sekretariat Baitul Mal			Melaksanakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh serta urusan pemerintahan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan waqaf
26	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten			Melaksanakan urusan lembaga lainnya

No	Nomenklatur Organisasi Perangkat Kabupaten		Tipe Organisasi		Keterangan
	2016	2017	2016	2017	
27	Sekretariat Kopri	Sekretariat Kopri			Melaksanakan urusan lembaga lainnya
28	Rumah Sakit Umum Tengku Peukan	Rumah Sakit Umum Tengku Peukan			Melaksanakan urusan pelayanan kesehatan khusus
29	Dinas Pertanahan Kabupaten	Dinas Pertanahan Kabupaten			Melaksanakan urusan bidang pertanahan
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			Melaksanakan urusan lembaga lainnya
31	Kecamatan Babahrot	Kecamatan Babahrot	B	B	Melaksanakan urusan pendukung bidang urusan pemerintahan
32	Kecamatan Kuala Batee	Kecamatan Kuala Batee	B	B	
33	Kecamatan Jeumpa	Kecamatan Jeumpa	B	B	
34	Kecamatan Susoh	Kecamatan Susoh	A	A	
35	Kecamatan Blangpidie	Kecamatan Blangpidie	A	A	
36	Kecamatan Setia	Kecamatan Setia	B	B	
37	Kecamatan Tangan – Tangan	Kecamatan Tangan – Tangan	B	B	
38	Kecamatan Manggeng	Kecamatan Manggeng	B	B	
39	Kecamatan Lembah Sabil	Kecamatan Lembah Sabil	B	B	

Sumber : Data dari Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Barat Daya, 2020

1.2.2. Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Setiap organisasi pemerintahan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memerlukan penataan organisasi sumber daya aparatur pemerintah agar organisasi dapat berjalan secara sistematis dan efisien. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan sesuatu yang penting dalam organisasi guna untuk menanggapi setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan

eksternal organisasi, dimana perubahan lingkungan eksternal dapat dikembangkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur. Pengembangan sumber daya aparatur bermakna perwujudan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Aparatur dituntut untuk mampu memaksimalkan kapasitas potensial yang dimilikinya, kemudian diaplikasikan secara langsung ke dalam ketugasan pokok dan fungsi mereka sebagai sosok customer atau pelayan yang responsif terhadap keinginan, keperluan atau yang dibutuhkan baik internal maupun eksternal.

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pada saat ini jumlah aparatur sebanyak 3.261 orang yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil menurut Golongan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Komposisi PNS berdasarkan Golongan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2019

No	Golongan/Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Golongan. I	17
2	Golongan. II	821
3	Golongan. III	1.653
4	Golongan. IV	770
Jumlah Total		3,261

Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Dari Tabel 1.2 di atas, terlihat bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil yang paling banyak adalah pada PNS Golongan III, yakni sebanyak 1.653 orang (50,69%), kemudian Golongan II sebanyak 821 orang (25,18%). Sedangkan pegawai Golongan IV ada sebanyak 770 orang (23,61%) dan pegawai dengan Golongan I adalah yang paling sedikit dengan jumlah 17 orang (0,52 persen).

- a) Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural sebanyak 501 orang yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Jabatan Pengawas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Jabatan/Esselonering di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2019

No	Jabatan/Esselonering	Jumlah (Orang)
1	Jabatan Pimpinan Tinggi (Eselon.IIa / IIb)	1 / 25
2	Jabatan Administrator (Eselon.IIIa / IIIb)	52 / 77
3	Jabatan Pengawas (Eselon.IVa / IVb)	323 / 21
4	V.a	2
Jumlah Total		501

Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

b) Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Pendidikan :

Tabel 1.4
Komposisi PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya per 31 Desember 2019

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD/MIN	11
2	SMP	23
3	SMA	790
4	Diploma	775
5	S1	1.596
6	S2	66
7	S3	0
Jumlah Total		3261

Sumber : Data BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Dilihat dari tabel di atas mayoritas PNS di Kabupaten Aceh Barat Daya paling banyak berpendidikan S.1, yakni 1.596 orang (48,94 %) dan yang berpendidikan SMA sebanyak 790 orang (24,23 %) sedangkan PNS yang berpendidikan Diploma sebanyak 775 orang (23,77%). Jumlah pegawai yang berpendidikan pasca sarjana masih sangat sedikit yakni 66 Orang (2,02 %) dan masih terdapat pegawai yang berpendidikan setingkat SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya, yakni sebanyak 34 orang (1,05%).

1.3. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya

1.3.1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Aceh. Posisi geografis Aceh Barat Daya sangat strategis karena berada di bagian barat Provinsi Aceh yang menghubungkan lintasan koridor barat dengan berbatasan langsung laut lepas (Samudera Hindia), menjadi hilir dari sungai-sungai besar yang mengalir perairan lepas serta mempunyai topografi yang sangat fluktuatif, mulai dari datar (pantai) sampai bergelombang (gunung dan perbukitan) dengan potensi daerah dibidang perkebunan, pertanian, perikanan dan perdagangan.

Dari jalur darat Kabupaten Aceh Barat Daya sangat strategis karena terletak dipertengahan lintasan jalur darat barat – selatan Aceh sehingga dari dulunya Kabupaten Aceh Barat Daya sudah terkenal dengan sebutan Kota Dagang dan Kota Padi Sigupai.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak di bagian Timur Provinsi Aceh yaitu berada pada 96°34'57" – 97°09'19" bujur timur dan 3°34'24" - 4° 05'37" lintang utara. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues;
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya; dan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan.

1.3.2. Administratif

Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data RTRW Tahun 2013 -2033, terbagi menjadi 9 Kecamatan, 23 Kemukiman dan 152 Gampong.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : Qanun RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya, (2013-2033)

Tabel 1.5
Gambaran Umum Kecamatan Wilayah
di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa				Luas Wilayah (Ha)	Jarak Ibukota Kab dengan Ibu Kota Kec (KM)
		Kemukiman	Sebelum Pemekaran	Desa Baru	Total Desa		
1. Babahrot	Pantee Rakyat	2	7	7	14	52.828,06	32
2. Kuala Batee	Kota Bahagia	3	18	3	21	31.482,42	19
3. Jeumpa	Alue Sungai Pinang	2	10	2	12	22.928,69	12
4. Susoh	Padang Baru	5	28	1	29	1.905,35	5
5. Blangpidie	Pasar Blangpidie	4	19	1	20	58.122,21	2
6. Setia	Lhang	1	6	3	9	4.120,27	7
7. Tangan - Tangan	Tanjung Bunga	2	15	-	15	6.322,97	11
8. Manggeng	Kedai Manggeng	3	17	1	18	5.551,86	22
9. Lembah Sabil	Cot Bak U	1	12	2	14	4.943,19	26
Jumlah		23	132	20	152	188,205,02	-

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya, (2013-2033)

Dari Gambar 1.1 dan Tabel 1.5 di atas jelas terlihat bahwa kecamatan terbesar di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Kecamatan Blangpidie dengan luas wilayah 58.122,21 Ha atau 30,88% dari luas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya secara keseluruhan, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Susoh dengan luas wilayah 1.905,35 Ha atau 1,01% dari seluruh luas wilayah kabupaten yaitu 1.882,05 Km² atau 188.205,205 Ha. Hal ini juga menggambarkan bahwa adanya pemerataan pembagian wilayah administratif antar kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.3.3. Demografi

1.3.3.1. Kependudukan

Secara definisi menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk itu adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Di Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah penduduk yang mendiami 9 kecamatan dan 152 gampong definitif mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun jumlah kenaikan yang terjadi tidak signifikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 adalah sebanyak 152.248 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk per Kecamatan
Kondisi 31 Desember 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk Per Jenis Kelamin (Jiwa)		Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
	Laki - Laki	Perempuan		
1. Babahrot	10.710	10.139	52,828	119
2. Kuala Batee	10.988	10,776	17,699	372
3. Jeumpa	5.718	5.652	36,712	94
4. Susoh	12.461	12.372	1,905	3,954
5. Blangpidie	11.964	11.986	47,368	155
6. Setia	4.496	4.318	4,392	614
7. Tangan - Tangan	7.015	6.805	13,291	316
8. Manggeng	7.908	7.584	4,094	1,151
9. Lembah Sabil	5.706	5.650	9,915	349
Jumlah	76.966	75.282	188,204	7,124

Sumber Data : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya, Tahun 2020

Jelas terlihat pada tabel di atas bahwa Kecamatan Susoh merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 12.461 jiwa penduduk pria dan 12.372 jiwa penduduk perempuan, meskipun Kecamatan Susoh merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Aceh Barat Daya seluas 1,905 Ha². Kepadatan penduduk pada kecamatan ini mencapai 3.954 jiwa/Km². Hal ini berbanding terbalik dengan Kecamatan Setia yang dengan jumlah penduduk terjarang yaitu sebanyak 8,814 jiwa yang mendiami wilayah seluas 4,392 Ha dan kepadatan penduduk 614 Jiwa/Km².

Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya jika ditinjau dari jenis kelamin atau *sex ratio* secara umum dapat dikatakan berimbang yaitu **76.966** jiwa laki – laki (50,55%) dan **75.282** jiwa perempuan (49,44%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk per Usia Penduduk dan *Sex Ratio*
Kondisi 31 Desember 2019

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jenis Kelamin dan Umur Penduduk										Sex Ratio
		Laki - Laki					Perempuan					
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Babahrot	52,828	10.611	10.913	11.189	10,500	10.710	9.997	10.254	10,501	9.930	10.139	105,98
Kuala Batee	17,699	11.120	11.299	11.484	10,914	10.988	10.797	11.005	11,202	10,645	10,776	102,34
Jeumpa	36,712	5.799	5.864	5.949	5.676	5.718	5.753	5.843	5,911	5,582	5.652	101,15
Susoh	1,905	12.741	12.874	12.987	12.398	12.461	12.390	12.565	12.779	12.319	12.372	101,00
Blangpidie	47,368	12.392	12.548	12.804	11,995	11.964	12.225	12.433	12,712	12,015	11.986	100,14
Setia	4,392	4.720	4.772	4.816	4.487	4.496	4.495	4.523	4,589	4.291	4.318	104,87
Tangan - Tangan	13,291	7.028	7.180	7.310	6,984	7.015	6.906	7.011	7,117	6,740	6.805	103,13
Manggeng	4,094	7.949	8.119	8.261	7,824	7.908	7.724	7.844	7,967	7,561	7.584	103,81
Lembah Sabil	9,915	5.820	5.818	5.990	5.661	5.706	5.830	5.980	5.991	5.630	5.650	100,50
Jumlah	1882,05	78.180	79.387	80.790	76,439	76.966	2015	77.458	78.729	74.713	75.282	

Sumber Data : Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

1.4. Gambaran Umum Perekonomian

1.4.1. Tinjauan Ekonomi

Sejak berdiri tahun 2002 yang lalu, perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir (2014-2018). Keadaan ini dapat diamati dari pergerakan beberapa indikator ekonomi makro, salah satunya, adalah laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya selama 4 tahun secara berturut-turut (2014 – 2018) memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu 1,10 persen (2014), 2,34 persen (2015), 4,56 persen (2016) 4, 46 persen (2017) dan 4,61 persen (2018) atau mengalami tren peningkatan yang positif yaitu 2.428.320,02 juta rupiah (2014), 2.509.313,89 juta rupiah (2015) 2.623.750,51 juta rupiah (2016) dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2.740.778,26 juta rupiah serta 2.867.170.99 juta rupiah (2018) dengan laju pertumbuhan PDRB masing-masing sebesar 4,46 persen dan 4,61 persen. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya kecenderungan penurunan kontribusi terhadap PDRB dari sektor-sektor yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya, utamanya seperti pada sektor Pertambangan menunjukkan *trend* menurun sangat signifikan dimana pada tahun 2014 sebesar 25,47 persen menjadi -15,45 persen pada tahun 2017 dan 0,44 persen pada tahun 2018. Namun disisi lain pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan harga konstan juga memperlihatkan tren peningkatan yang positif di beberapa sektor dalam 5 (lima) tahun terakhir, seperti pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu dari 4,80 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 8,13 persen pada tahun 2018. Selain itu sektor jasa pendidikan dari 2,23 persen ditahun 2014 meningkat menjadi 7,07 persen di tahun 2018 pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga memperlihatkan tren peningkatan yang cukup baik yaitu dari -94 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 4, 26 persen pada tahun 2018.

Tabel. 1.8
Perkembangan Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB seri 2010
Kabupaten Aceh Barat Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Sektor		2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp	growth (%)	Rp	growth (%)	Rp	growth (%)	Rp	growth (%)	Rp	growth (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	645.387,18	-2,94	714.896,78	10,77	753.692,65	5,43	792.179,26	5,11	825.947,16	4,26
2	Pertambangan dan Penggalian	116.317,77	-25,47	43.855,47	-62,30	44.050,22	0,44	37.244,97	-15,45	37.407,91	0,44
3	Industri Pengolahan	67.091,78	3,83	69.754,79	3,97	71.904,20	3,08	74.764,62	3,98	77.799,90	4,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.903,03	5,25	3.088,85	6,40	3.259,45	5,52	3.481,18	6,80	3.732,74	7,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	116,42	5,12	123,48	6,06	131,68	6,64	143,67	9,11	155,41	8,17
6	Konstruksi	341.654,93	6,65	363.474,83	6,39	37.9078,34	4,29	399.681,84	5,44	419.483,21	4,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	421.736,81	6,18	44.4143,69	5,31	465.756,38	4,87	486.858,06	4,53	508.589,17	4,46
8	Transportasi dan Pergudangan	186.211,25	3,56	192.597,27	3,43	194.398,89	0,94	196.612,98	1,14	203.842,64	3,68
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17.067,15	4,80	17.942,38	5,13	19.038,95	6,11	20.135,52	5,76	21.773,20	8,13
10	Informasi dan Komunikasi	63.170,64	5,70	66.680,14	5,56	68.926,86	3,37	71.173,58	3,26	72.803,30	2,29
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	47.363,51	4,45	49.366,66	4,23	50.944,32	3,20	52.521,97	3,10	53.699,18	2,24
12	<i>Real Estate</i>	73.469,13	4,07	75.680,82	3,01	77.968,22	3,02	81.366,62	4,36	85.503,66	5,08
13	Jasa Perusahaan	7.782,12	2,68	7.990,05	2,67	8.277,09	3,59	8.564,13	3,47	9.051,79	5,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	220.206,26	6,96	235.196,59	6,81	25.2214,87	7,24	269.233,15	6,75	286.681,36	6,48
15	Jasa Pendidikan	58.247,85	2,23	59.537,72	2,21	62.547,35	5,05	66.167,97	5,79	70.848,60	7,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83.654,54	4,64	87.288,31	4,34	91.762,88	5,13	97.248,45	5,98	102.934,57	5,85
17	Jasa lainnya	75.939,64	3,12	77.696,05	2,31	79.798,17	2,71	83.400,28	4,51	86.917,18	4,22
PDRB ADHK		2.428.320,02	1,10	2.509.313,89	3,34	2.623.750,51	4,56	2.740.778,26	4,46	2.867.170,99	4,61

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya Tahun 2020

Perkembangan nilai dan laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya pertambahan nilai pada setiap sektor yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Perkembangan nilai dan laju pertumbuhan tersebut tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berdasarkan tabel di atas, masih menunjukkan bahwa pertumbuhan sempat mengalami perlambatan di tahun 2016 – 2017 yang tumbuh sebesar 4,56 persen dan melemah menjadi 4,46 persen pada tahun 2017. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh masih belum optimalnya pengelolaan di sektor – sektor lain yang bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun masih sangat bergantung kepada sektor primer seperti sektor pertanian yang selama periode tersebut menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya. Kendatipun demikian, sejak tahun 2014 hingga 2018 pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya kembali mengalami pertumbuhan positif pada yang cukup signifikan, peningkatan tersebut terutama dari sisi produksi yang didorong oleh meningkatnya secara signifikan sumbangan sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Tabel 1.9
Pendapatan Regional dan Pendapatan Perkapita
Kabupaten Aceh Barat Daya atas Dasar
Harga Berlaku (Hb) maupun atas dasar Harga Konstan (Hk)
Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	PDRB	24283 20,02	27801 24,00	25093 13,89	29683 53,76	26237 50,51	31748 13,01	27407 78,26	33943 18,45	28671 70,99	36354 90,97
2	PDRB Perkapita	17,58	20,13	17,84	21,10	18,31	22,15	18,81	23,29	19,36	24,55

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya Tahun 2020

PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2018 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku (Hb) maupun atas dasar harga konstan (Hk) dimana PDRB atas dasar Hb pada tahun 2017 sebesar Rp3.394.668,50,- menjadi 3.365.490,97 pada tahun 2018. Sedangkan PDRB atas dasar Hk seri 2010 pada tahun 2017 sebesar Rp2.740.778,26 meningkat menjadi Rp2.869.170,99 pada tahun 2018.

Bila dilihat dari peranan masing-masing sektor, struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2018 masih didominasi oleh sektor pertanian sebab sektor ini memberikan *sharenya* sebesar 29,68% dari total PDRB Aceh Barat Daya. Hal ini menunjukkan bahwa basis perekonomian Aceh Barat Daya yaitu terletak pada sektor pertanian. Sektor-sektor lain juga memberikan *share* yang cukup besar bagi perekonomian Aceh Barat Daya diantaranya sektor perdagangan sebesar 17,58% dan sektor konstruksi sebesar 15,93%.

Tabel 1.10
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 – 2018
Atas Dasar Harga Berlaku 2000 dan 2010 (Juta Rupiah)

Sektor		2014		2015		2016		2017		2018	
		Rp	share (%)	Rp	share (%)	Rp	share (%)	Rp	share (%)	Rp	share (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	777.936,75	27,98	88.7591,41	29,90	940.682,78	29,63	100.3407,57	29,56	107.9165,50	29,68
2	Pertambangan dan Penggalian	117.014,04	4,21	47.196,02	1,59	47.690,99	1,50	41.324,96	1,22	420.83,73	1,16
3	Industri Pengolahan	82.246,70	2,96	88.865,59	2,99	94.864,88	2,99	103.721,19	3,06	108.428,15	2,98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.567,33	0,09	2.812,26	0,09	3.151,14	0,10	3.490,40	0,10	37.88,22	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	144,24	0,01	161,41	0,01	184,51	0,01	207,62	0,01	228,11	0,01
6	Konstruksi	411.073,18	14,79	446.235,53	15,03	485.978,58	15,31	53.0721,62	15,64	579.268,51	15,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	474.579,96	17,07	518.770,75	17,48	558.339,27	17,59	597.396,79	17,60	639.208,77	17,58
8	Transportasi dan Pergudangan	202.924,39	7,30	210.757,66	7,10	212.876,50	6,71	215.463,69	6,35	221.414,14	6,09
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.761,70	0,75	22.816,70	0,77	25.545,47	0,80	28.524,24	0,84	32.365,54	0,89
10	Informasi dan Komunikasi	68.107,54	2,45	72.365,53	2,44	75.157,66	2,37	77.949,79	2,30	80.055,34	2,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	58.890,34	2,12	63.705,89	2,15	68.089,60	2,14	72.382,30	2,13	77.185,53	2,12
12	Real Estate	84.269,63	3,03	89.699,91	3,02	95.984,99	3,02	103.381,08	3,05	109.106,97	3,00
13	Jasa Perusahaan	8.700,59	0,31	9.185,80	0,31	9.817,92	0,31	10.450,03	0,31	11.218,53	0,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.3718,28	8,41	258.170,29	8,70	286.971,24	9,04	315.772,20	9,30	340.438,55	9,36
15	Jasa	63.761,82	2,29	67.170,68	2,26	73.765,17	2,32	80.548,66	2,37	88.359,06	2,43

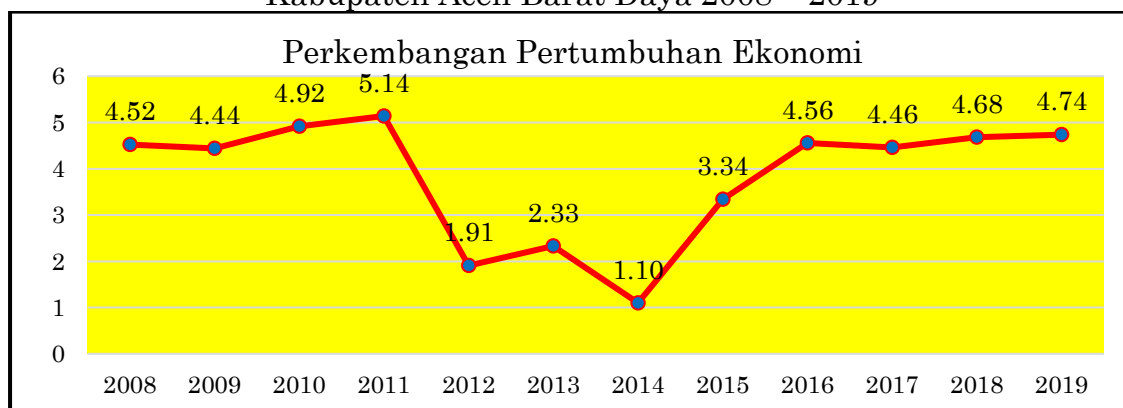
Sektor	2014		2015		2016		2017		2018	
	Rp	share (%)	Rp	share (%)	Rp	share (%)	Rp	share (%)	Rp	share (%)
Pendidikan										
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.204,33	3,17	93.104,21	3,14	99.702,22	3,14	106.300,24	3,13	114.220,28	3,14
17 Jasa lainnya	85.223,20	3,07	89.744,12	3,02	96.010,09	3,02	103.276,06	3,04	108.956,04	3,00
PDRB ADHB	278.0124,00	100,00	296.8353,76	100,00	317.4813,01	100,00	339.4318,45	100,00	363.5490,97	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Barat Daya Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan trend positif dalam 5 (lima) tahun terakhir, walaupun masih terlihat fluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 yang mencapai 4,47%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,10%. Tinggi rendahnya pertumbuhan tersebut lebih disebabkan karena kontribusi sektor-sektor pada PDRB yang secara keseluruhan belum memberikan kontribusi positif yang dapat meningkatkan nilai tambah PDRB Aceh Barat Daya.

Pada grafik berikut terlihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 2007-2011.

Grafik 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Aceh Barat Daya 2008 – 2019



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Aceh Barat Daya Tahun 2020

Pembangunan ekonomi jangka panjang sangat mempengaruhi struktur ekonomi, struktur ekonomi Aceh Barat Daya sampai tahun 2018 masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan dengan peranan sebesar 29,68% terhadap total PDRB. Kontribusi kedua terbesar adalah kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan peranan sebesar 17,58%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,46% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 4,68% pada tahun 2018.

Peningkatan PDRB ini merupakan dukungan dari beberapa sektor penggerak dan potensi unggulan daerah, terdapat dalam beberapa zona/kawasan perekonomian. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya yang mulai disusun semenjak tahun 2008 dan melalui proses yang panjang dan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan mendapatkan bantuan dari Kementrian PU untuk penyiapan data mentah berupa citra spot 5 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan strategis (KLHS). RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya disusun berdasarkan arahan kebijakan RTRW Aceh adalah kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh (*Aceh Trade and Distribution Center/ATDC*) Zona Selatan sebagai lokasi pusat agroindustri yang berada di kawasan industri terpadu dan kawasan strategis Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu :

Tabel 1.11
Pembagian Zona Kawasan Industri
Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Zona	Kecamatan	Arah Pengembangan
1	Babahrot, Kuala Batee. Manggeng dan Lembah Sabil	Kawasan Agropolitan, kawasan ini ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian.
2	Blangpidie	Kawasan Perkotaan, kawasan ini ditetapkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan perkotaan dan untuk mendukung kegiatan perkotaan seperti kegiatan perdagangan, jasa dan permukiman,
3	Kawasan pesisir Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan - Tangan Manggeng dan Lembah Sabil,	Kawasan Minapolitan, kawasan ini ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan pariwisata.
4	Babahrot dan Lembah Sabil	Kawasan Pertambangan, kawasan ini ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pertambangan. Wilayah ini memiliki potensi pertambangan yang cukup besar terutama potensi bijih besi dan emas.
5	Susoh	Kawasan Pendidikan kawasan ini ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pendidikan dan ditetapkan sebagai kawasan pendidikan bagi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sumber : Data diolah dari RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada isu dan kebijakan pembangunan provinsi Aceh, nasional dan internasional, maka rumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun yang tertuang dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi nilai-nilai Keislaman dalam Pembangunan Peradaban Masyarakat Aceh Barat Daya;

Isu ini akan menggambarkan perkembangan nilai-nilai keislaman dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya yang berpengaruh dalam proses interaksi antar individu dan pelaksanaan roda pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Penguatan kebudayaan melalui kesenian dan pelaksanaan kehidupan adat di Aceh Barat Daya;

Isu ini menampilkan aktivitas seni, budaya serta adat istiadat di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat menjadi suatu wadah bagi komunitas seni dan budaya dalam mengembangkan diri, disamping itu agar adat istiadat yang berada dalam kehidupan masyarakat tetap terjaga kelestariannya;

3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, amanah, dan bebas KKN untuk peningkatan pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;

Isu ini dapat menggambarkan tata kelola pemerintahan di kabupaten Aceh Barat Daya yang berhubungan langsung dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan keterbukaan informasi publik;

4. Pengembangan sistem data yang terpusat, terintegrasi dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan;

Dalam isu ini dapat dijelaskan bahwa penyajian data sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan. Dari telaah isu ini akan dimunculkan sebuah kegiatan yang dapat membuat pengelolaan dan penyajian data dapat tersaji dengan baik dan tepat.

5. Peningkatan pendapatan petani dan nelayan melalui kelembagaan, sarana dan prasarana teknologi pertanian, kelautan dan kehutanan;

Dari isu ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani dengan tidak meningkatnya nilai tukar petani.

6. Peningkatan produktifitas, kreatifitas, akses permodalan dan akses pasar untuk UMKM yang berdaya saing;

Isu ini berkenaan dengan masih lemahnya tingkat pengelolaan UMKM disebabkan akses modal dan keaktifan koperasi dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu unit yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

7. Pengembangan lembaga keuangan syari'ah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Dalam isu ini tergambar bahwa belum efektifnya lembaga keuangan syari'ah di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.

8. Pembangunan kawasan Ekonomi Agro - Maritim Aceh Barat Daya untuk pemanfaatan potensi gunung dan laut;
Isu ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan kawasan dalam rangka mendukung pemanfaatan usaha-usaha yang akan tercipta dari konsekuensi pengelolaan potensi gunung dan laut.
9. Penumbuhan sentra-sentra industri pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan serta pariwisata Aceh Barat Daya yang terintegrasi untuk menciptakan peluang kerja baru;
Isu ini akan menggambarkan bahwa belum adanya industri yang mendukung pemasaran produk-produk yang telah ada maupun akan dikembangkan dalam rangka mendukung terciptanya lapangan usaha kerja baru.
10. Ketersediaan sarana-prasarana yang berkualitas, fungsional dan memberikan dampak jangka panjang untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan resiko bencana dengan mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup;
11. Pengelolaan pendidikan formal dan non-formal di Aceh Barat Daya menggunakan prinsip-prinsip dan kerangka kerja pendidikan islami;
Isu akan menjadikan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya diarahkan kepada penciptaan standar pelayanan minimal sektor pendidikan yang berlandaskan konsep pendidikan islami.
12. Peningkatan relevansi, kualitas, tata-kelola dan aksesibilitas pendidikan di Aceh Barat Daya;
Isu ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan pendidikan yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
13. Kepastian memperoleh layanan kesehatan sesuai dengan standar kelayakan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Aceh Barat Daya;
Isu ini akan mewujudkan suatu pengelolaan layanan dibidang kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dengan peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan kesehatan unggulan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
14. Pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, air bersih, dan energi untuk masyarakat rentan;
Isu ini akan menciptakan sistem pengelolaan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berbasis data yang akurat dan tepat sasaran.
15. Pemenuhan layanan dasar untuk masyarakat Aceh Barat Daya;
Dari isu ini akan dikembangkan suatu pola pembangunan sarana prasarana serta pelayanan yang prima yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
16. Pembangunan kapasitas generasi muda Aceh Barat Daya dalam intelektualitas, moralitas, kreatifitas dan kemandirian ekonomi; dan
Isu ini akan mendorong terciptanya kreatifitas generasi muda yang mau berwirausaha dalam rangka mendorong terciptanya unit-unit usaha baru dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Daya.
17. Peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan di Aceh Barat Daya.

Isu ini menjadikan peran perempuan dalam proses pembangunan akan dilibatkan secara aktif dan memunculkan pelaku-pelaku usaha perempuan yang handal.

Selanjutnya berdasarkan telaah program pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022 dapat disimpulkan beberapa isu-isu yang berkaitan dengan terkait dengan penyusunan KLHS sebagai berikut :

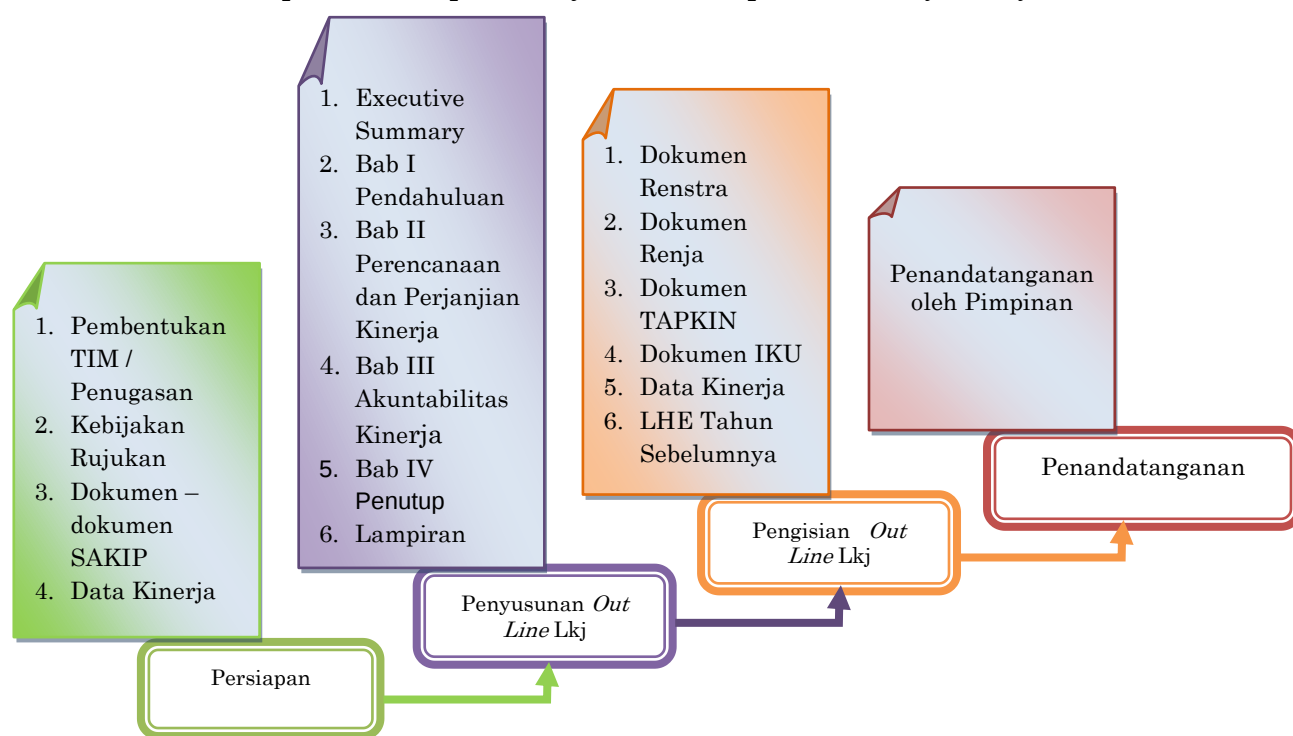
1. Rencana Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin;
2. Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit;
3. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro;
4. Rencana Pembangunan *Rice Milling* Unit;
5. Pembangunan Gedung *Training Center*/ Pusat Inovasi Pertanian;
6. Rencana Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat Daya;
7. Rencana Pembangunan Rumah Sakit Unggulan;
8. Rencana Pembangunan Gedung Olahraga; dan
9. Rencana Pembangunan Interkoneksi Jaringan Irigasi.

1.6. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Sistematika laporan kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara logis, tahap – tahap penyusunan LKj dapat digambarkan sebagai berikut :

Grafik 1.2
Tahapan – Tahapan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)



Adapun sistematika penyusunan laporan kinerja Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 dan ringkasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini di uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian Kinerja tahun yang berangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian hasil pencapaian kinerja dan indikator kinerja, pencapaian indikator makro, serta evaluasi dan analisis akuntabilitas pencapaian sasaran tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 serta capaian terhadap kinerja yang tertuang dalam RPJMK tahun 2017-2022.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian Kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

2.1. Visi dan Misi

Tahun 2018 adalah tahun pertama pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022. Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 - 2022 adalah:

“Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera Dan Islami”

Misi yang ingin dicapai berdasarkan visi di atas adalah:

1. Mengimplementasikan nilai-nilai Keislaman dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat serta Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam.

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan berdasarkan syariat Islam dalam kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa, amanah dan transparan melalui reformasi birokrasi dengan penerapan *e-government* dalam ruang lingkup birokrasi pemerintah yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

3. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah.

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan hasil produksi pada sektor-sektor strategis, antara lain peningkatan produksi hasil pertanian, produksi perikanan tangkap dan budidaya, produksi hasil peternakan serta produksi perkebunan termasuk pemasaran hasil produksi. Fokus perhatian dimaksud guna meningkatkan daya saing daerah yang diharapkan mampu menaikkan pendapatan perkapita secara signifikan yang akhirnya bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya pemerintah daerah juga berupaya memberikan kemudahan pembiayaan keuangan bagi usaha skala mikro dengan bantuan sumber pendanaan oleh lembaga keuangan berbasis syari'ah.

4. Menciptakan Peluang Kerja Baru melalui Pemanfaatan Potensi Daerah yang Berbasis Kearifan Lokal.

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan peran pemerintah dalam rangka menekan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru khususnya di sektor unggulan daerah, membuka peluang investasi dan perizinan bagi dunia usaha.

5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat.

Maksud dari misi ini adalah upaya dan peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana perekonomian masyarakat yang dikhususkan pada wilayah sentra-sentra produksi unggulan daerah. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis, sehingga dapat memunculkan peluang investasi kondusif ditingkat lokal, regional dan global.

6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Memberikan Dukungan Maksimal terhadap Pendidikan Formal dan Informal.

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia melalui peningkatan mutu pendidikan formal dan informal dengan melakukan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten termasuk pemerataan sarana dan prasarana pendidikan.

7. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas untuk Mewujudkan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Sehat.

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya mewujudkan masyarakat yang sehat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dengan memastikan kemudahan akses, pelayanan yang ramah, cepat dan terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kapasitas SDM pada seluruh unit pelayanan kesehatan serta pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar.

8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan kesempatan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih layak.

9. Meningkatkan Kreatifitas Kepemudaan dan Kebijakan yang Responsif Gender

Maksud dari misi ini adalah upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang kreatif, inovatif dan positif sebagai aset daerah dalam proses pembangunan dan memberikan kesempatan bagi perempuan dalam pembangunan dengan penguatan regulasi.

2.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran strategis merupakan perwujudan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017-2022, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai pedoman dan acuan oleh seluruh

SKPK di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menentukan program prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017-2022.

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018-2022

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun selama lima tahun (2018-2022) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2022

Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan, pelayanan publik dan infrastruktur strategis untuk mendukung sektor riil	Pengembangan usaha-usaha produktif rakyat dan membuka lapangan kerja melalui pengelolaan kawasan agro –maritim dan <i>Aceh Trade Distribution Center</i> (ATDC), perhutanan sosial serta intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	Peningkatan nilai tambah pasca panen melalui UMKM, pengembangan akses dan jaringan pasar, agrowisata serta optimalisasi pelayanan publik	Pembangunan industri pengolahan produk unggulan hasil pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.	Peningkatan PAD melalui jaminan produksi industri dan pemenuhan kebutuhan pasar Barat-Selatan Aceh untuk pengentasan kemiskinan

Adapun prioritas pembangun selama lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMK Aceh Barat Daya Tahun 2018-2022 ditetapkan sebanyak 8 (delapan) prioritas Pembangunan yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Syariat Islam, Sosial dan Budaya
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Pembukaan Lapangan Kerja dan Penanggulan Kemiskinan
6. Pemanfaatan Potensi Daerah dan Sumber Daya Lokal
7. Sarana dan Prasarana Infrastruktur
8. Penataan dan Pengembangan Kawasan

2.3. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2019

Tahun 2019 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Aceh Barat Daya 2017 - 2022 yang diamanatkan oleh Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 yang berisikan perencanaan yang bersifat makro sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro pada setiap tahunnya, dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK). Oleh karena itu, maka Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya ini disusun dan disesuaikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) yang terdapat pada amanat Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun 2019 dan amanat Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

Ringkasan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4 Perjanjian Kinerja dan APBD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMK Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2017, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Kabupaten (APBK) Perubahan Tahun 2019.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam rangka mewujudkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran strategis dalam waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2019 yang telah disusun. Adapun ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 adalah :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bupati Aceh Barat Daya
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI 1 : Mengimplementasikan Nilai-nilai Keislaman dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat serta Mewujudkan Pelaksanaan Syari'at Islam			
1.	Terinternalisasinya Nilai-nilai Keislaman dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya	1.1. Angka Kriminalitas yang Ditangani 1.2. Jumlah Penerimaan ZIS 1.3. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam 1.4. Jumlah Dayah terakreditasi 1.5. Peningkatan Jumlah Hafidz dan Hafidzah	13 Kasus Rp 3362.963.894,- 30% 8 Dayah 1 Orang
2.	Meningkatnya Peran Pelaku Seni dan Pelaksanaan Kehidupan Adat Dalam Mendukung Pembangunan Masyarakat di Aceh Barat Daya	2.1. Persentase jumlah Sanggar Seni yang Aktif	35%
MISI 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			
3.	Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan	3.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (>50)	50,52

Efisien dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi	3.2.	Nilai Rata-Rata Capaian SPM Kabupaten	47,86%
	3.2.1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,00%
	3.2.2.	Dinas Kesehatan	55,50%
	3.2.3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40,46%
	3.2.4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	44,17%
	3.2.5.	SATPOL PP dan WH	51%
	3.2.6.	Dinas Sosial	20,0%
	3.3.	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
	3.4.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,3%
	3.5.	% Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	80%
	3.6.	% Usulan Musrembang yang Terealisasi dalam Rencana Anggaran Kabupaten	75%
	3.7.	Nilai Tingkat Maturitas SPIP	Level 3

MISI 3: Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

4.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	4.1.	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	206.196,27/ Ton
		4.2.	Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian	8,3 Ton/Ha
		4.3.	Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	32,114/Ton
		4.4.	Meningkatnya Luas Lahan Perkebunan	29.314/ Ha
		4.5.	Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1.213.268,83/ kg
5.	Mewujudkan kemudahan akses permodalan dan pasar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat	4.6.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan	14.732 Ton
		5.1	Prosentase Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,7 %
		5.2.	Prosentase Koperasi Aktif	2 Unit
6.	Terwujudnya Pembangunan Kawasan Ekonomi Agro Maritim dan Tumbuhnya Sentra- sentra Industri Pengolahan dalam Rangka Menciptakan Lapangan Kerja Baru	6.1.	Jumlah BUMG yang Memiliki Kapasitas untuk Mengelola Usaha-usaha Pasca Panen	4 Gampong
		6.2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	60 Orang

		6.3. Prosentase Penurunan Angka Kemiskinan	16,10%
		6.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10%
MISI 5: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat			
7.	Terwujudnya Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Strategis	7.1. Peningkatan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	5.000 M
		7.2. Luas Layanan Daerah Irigasi Teknis Kabupaten	3.100 Ha
		7.3. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	50 Unit / Km
8.	Terwujudnya Pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Barat Daya	8.1. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dengan RTRW	6%
9.	Terlaksananya Pengelolaan Sektor SDA sesuai Peruntukan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	9.1. % Korban Bencana yang Menerima Bantuan Tanggap Darurat	90%
MISI 6: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Memberikan Dukungan Maksimal terhadap Pendidikan Formal dan Informal			
10.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan pada Semua Jenjang yang Memiliki	10.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	

	Daya Saing Tingkat Nasional maupun Regional	10.2. Angka Partisipasi Murni	
		a. SD/MI	80.00%
		b. SMP/MTs	70.00%
		10.3. Angka Partisipasi Kasar	
		a. SD/MI	87,53%
		b. SMP/MTs	85,47%
		10.4. Angka Melek Huruf	97,12%
		10.5. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan islami	2%
		10.6. Angka Kelulusan	
		a. SD/MI	100,00 %
b. SMP/MTs	100.00%		
MISI 7: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas untuk Mewujudkan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Sehat			
11.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Mampu Menjangkau	11.1. Umur Harapan Hidup	64,51Tahun

	Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh Barat Daya	11.2. Angka Kematian Bayi per 1.000 LH	6
		11.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1.000 LH	2
		11.4. Gizi Buruk	0
		11.5. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	1 Unit
MISI 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial			
12	Tersedianya Kebutuhan untuk Masyarakat Rentan Terkait Pangan, Perumahan, Air Bersih, Energi, Santunan Melahirkan dan Bantuan Hukum	12.1. Panjang Saluran Lingkungan yang Dibangun	6500 M
		12.2. Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Listrik	99%
13.	Terpenuhinya Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Aceh Barat Daya	13.1. Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial	
		1. Disabilitas	120 Orang
		2. Fakir Miskin	10.000 Orang
		2. Anak Yatim/ Yatim Piatu	2.900 Orang
MISI 9. Meningkatkan Kreatifitas Kepemudaan dan Kebijakan yang Responsif Gender			

14.	Terwujudnya Pemuda Aceh Barat Daya yang Mandiri, Aktif dan Berprestasi	14.1. Jumlah wirausaha muda	8 Orang
		14.2. Cabang olahraga berprestasi	7 Cabang
		14.3. Persentase OKP yang aktif	45%
15.	Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan di Aceh Barat Daya	15.1. Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Struktural	36%

Tabel 2.3
Rencana Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	560.325.946.724.00,-	51,83
2	Belanja Langsung	520.666.331.497.00,-	48,16
3	Total	1.080.992.278.221,00,-	100

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diasumsikan bahwa porsi belanja tidak langsung dan belanja langsung pada tahun anggaran 2019 masih dalam komposisi wajar. Pada tabel di atas anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp560.325.946.724.00,- atau 51,83% dan belanja langsung Rp520.666.331.497.00 atau 48,16% dari total anggaran Rp1.080.992.278.221,00. Dengan demikian terdapat selisih antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung sekitar 3,67% yang masih sangat memungkinkan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mewujudkan program-program pembangunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi pemerintah secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Laporan kinerja merupakan kewajiban yang harus disusun oleh pemerintah dan terbuka sehingga publik dapat menilai secara objektif berdasarkan fakta dan data yang ada terkait kinerja pemerintah. Penilaian publik tersebut nantinya akan menjadi umpan balik (*feedback*) bagi pemerintah dalam memperbaiki berbagai kekurangan yang ada agar kinerja di waktu mendatang dapat terus ditingkatkan sehingga dapat memenuhi ekspektasi publik itu sendiri.

Pada bab ini, akuntabilitas kinerja akan menguraikan tentang perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Tahun 2017-2022 melalui perjanjian kinerja tahun 2019. Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan dengan mengevaluasi dan menganalisis hasil pengukuran pencapaian setiap sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

A. Metode Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai dalam mewujudkan organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (rencana capaian). Dari hasil pengukuran tersebut akan diketahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian tingkat capaian yang semakin baik (Progres Positif) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (Progres Negatif), maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut :

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	Lebih 75% sampai 100%	Baik
3	Lebih 55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

B. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun ini, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah, serta standar nasional, penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, efisiensi penggunaan sumberdaya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target yang diperjanjikan pada setiap indikator dalam kurun waktu satu tahun.

Hasil pengukuran kinerja beserta analisis pada setiap sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

- Misi 1 : Mengimplementasikan Nilai-nilai Keislaman dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat serta Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam
- Tujuan 1 : Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Islami dan Berbudaya Keacehan melalui Pelaksanaan Syariat Islam dalam Semua Aspek Kehidupan

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terinternalisasi nya Nilai-nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya	1. Angka Pelanggaran Qanun yang Ditangani	13 Kasus	18 Kasus	138,46	Sangat Baik
	2. Jumlah Penerimaan ZIS	Rp 3.362.963.894	Rp 3.051.349.821	90,73	Baik
	3. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam	30% (4 Kasus)	91% (11 Kasus)	303	Sangat Baik
	4. Jumlah Dayah yang Terakreditasi	8 Dayah	39 Dayah	487,5	Sangat Baik
	5. Peningkatan Jumlah Hafidz dan Hafidzah	1 Orang	6 Orang	600	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				326,33	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja pada Sasaran Strategis **"Terinternalisasinya Nilai-nilai Keislaman dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya"** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Sangat Baik**dengan rata-rata persentase capaian sebesar 323,33%.

Keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pencapaiansasaran strategis ini didukung oleh capaian setiap indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja **"Angka Pelanggaran Qanun yang Ditangani"** ditargetkan sebanyak 13 kasus dapat direalisasi sebesar 18 kasus sehingga tingkat capaian sebesar 138,46% dengan kategori **Sangat Baik**.
SKPK yang bertanggung jawab dalam menjalankan indikator kinerja ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Sat Pol PP-WH), selama tahun 2019 telah terjadi pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebanyak 18 Kasus, dari semua kasus yang dilakukan penyidikan sebanyak 2 (dua) kasus ditingkatkan ke tahap P-21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya

untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Syariah, sedangkan 16 (enam belas) kasus dilakukan pembinaan terhadap pelanggar syariat tersebut.

Data jenis pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Data Jenis Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH PELANGGARAN YANG TERSELESAIKAN	NOMOR DAN PERIHAL PERDA / QANUN YANG DILANGGAR
1	Penertiban PNS	16	16	PP No 53 Tahun 2010/ Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2	Penertiban Hewan	6	6	Qanun No 2 Tahun 2008/ Penertiban Hewan
3	Penertiban Pasar	10	10	Perda No 3 Tahun 2007/ Penertiban Pasar
4	Hukum Jinayat / Pasal 25 Ayat (1) Jarimah Ikhtilath/ P21	2	2	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
5	Hukum Jinayat /Pasal 23 Ayat (1) Jarimah Khalwat/ Pembinaan	17	17	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
6	Penertiban Gas Elpiji	58	58	Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor : 461/ 2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
7	Operasi Terpadu	5	5	-
8	Patroli	3	3	-
10	Pengawasan Qanun Aceh	62	62	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
11	Pengamanan Tempat Ibadah	30	30	-
Total		209	209	

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

2. Indikator Kinerja **“Jumlah Penerimaan ZIS”** ditargetkan sebesar Rp3.362.963.894,-, dapat direalisasikan sebesar Rp3.051.349.821 dengan tingkat capaian sebesar 90,73% atau berkategori **Baik**.

Pada tahun 2019 realisasi target tidak tercapai 100% karena banyaknya ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang memasuki usia pensiun, sementara ditahun tersebut tidak ada formasi pengadaan Pegawai ASN. Disamping itu, beralihnya status ASN sebagai tenaga guru tingkat



Gambar 3.1
Penyaluran ZIS Secara Simbolis Tahun 2019

SMA/ sederajat menjadi ASN Provinsi Aceh menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Barat Daya.

ZIS tahun 2019 ini diberikan untuk 7.850 penerima bantuan yang terdiri atas :

- Asnaf Fakir sebanyak 786 penerima bantuan
- Asnaf Miskin sebanyak 3.133 penerima bantuan
- Asnaf Fisabilillah sebanyak 3.420 penerima bantuan
- Asnaf Ibnu Sabil sebanyak 494 penerima bantuan, dan
- Asnaf Muallaf sebanyak 17 penerima bantuan.

3. Indikator Kinerja “**Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Syari’at Islam**” ditargetkan sebesar 30% dengan realisasi sebesar 90% dengan tingkat capaian 300% atau berkategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2018 jumlah pelanggaran syariat yang terjadi



di Kabupaten Aceh Barat Daya sebanyak 21 kasus setelah melalui proses hukum dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Diawal tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berharap adanya penurunan kasus pelanggaran syariat sebesar 30% dari tahun 2018 atau menurun sebanyak 7 kasus atau paling banyak 13 kasus. Namun dalam perjalanannya, kasus pelanggaran syari’at Islam dan dinyatakan *inkracht* pada tahun 2019 hanya terdapat 2 kasus sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pada indikator kinerja ini menunjukkan hasil yang sangat baik.

Uraian di atas dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

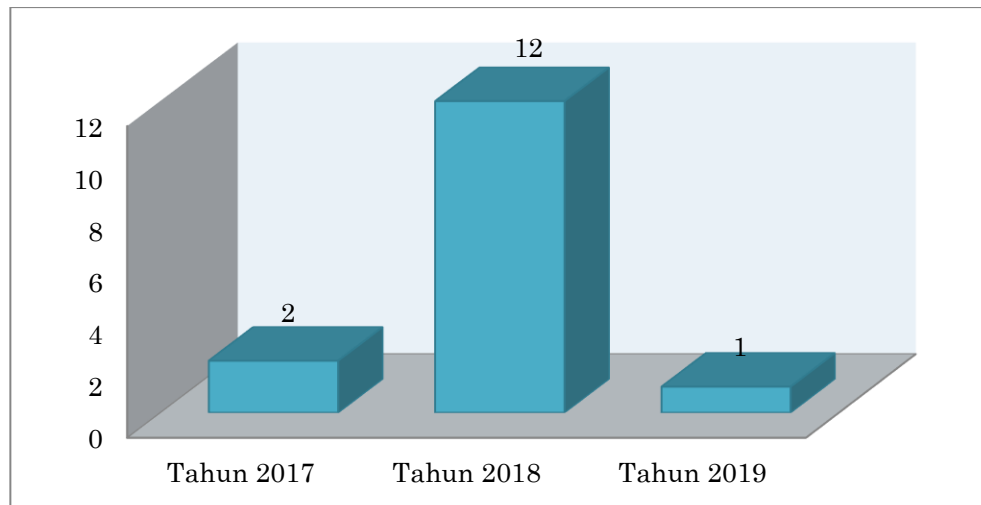
Tabel 3.2
Kondisi Jumlah Kasus Pelanggaran Syari’at Islam Tahun 2019

Kondisi	Uraian
Jumlah Kasus 2018	12 Kasus
Target Penurunan Kasus Tahun 2019	4 Kasus
%Target Penurunan Kasus Tahun 2019	$(4/12) \times 100\% = 33,33\%$ atau dikecilkan menjadi 30%
Realisasi Tahun 2019	1 Kasus
Jumlah Penurunan Tahun 2019	$12 - 1 = 11$ Kasus
% Penurunan Tahun 2019	$(11/12) \times 100\% = 91\%$
% Capaian	$(90/30) \times 100 = 303\%$
Kategori	Sangat Baik

Dari jumlah kasus tahun 2018 (21 kasus) dan tahun 2019 (2 kasus) pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan semuanya dilakukan di tahun 2019.

Berikut disajikan grafik jumlah kasus pelanggaran syariat yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2017-2019.

Grafik 3.1
Kasus Pelanggaran Syari'at Islam yang telah Dinyatakan *Inkracht*
periode 2017 – 2019



Berikut ditampilkan daftar kasus yang telah *inkracht* di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2018 – 2019.

Tabel 3.3
Daftar Kasus Jarimah yang Telah *Inkracht*
di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2018 – 2019

No	Jarimah (Tindak Pidana)	Jumlah Kasus	Jumlah Terpidana	Ket
1	Pemeriksaan	4	5	Terjadi Tahun 2018
2	Pelecehan	2	2	
3	Ikhtilath	4	8	
4	Maisir	1	5	
5	Zina	1	1	
6	Ikhtilath	1	2	Terjadi Tahun 2019
Jumlah		13	23	

4. Indikator Kinerja “**Jumlah Dayah yang Terakreditasi**” untuk tahun 2019 ditargetkan sebanyak 8 dayah, namun realisasi tersebut jauh melebihi target yang dijanjikan yaitu terealisasi sebanyak 39 dayah yang terakreditasi sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 487,5% dengan kategori **Sangat Baik**.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, menyatakan bahwa pesantren/dayah wajib memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

- Kyai atau sebutan lainnya atau laqap lainnya yang pernah mengaji/nyantri di dayah;

- Santri yang mukim di pesantren;
- Bilik atau sarana pesantren/dayah;
- Masjid atau mushalla;
- Pengajian dan kajian Kitab Kuning atau dirasah islamiyah dengan pendidikan mu'allim.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya hanya menargetkan 8 (delapan) dayah untuk dilakukan akreditasi oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syariat Islam, namun pada pelaksanaannya Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh melakukan akreditasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dayah yang ada Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari berbagai tipe – tipe dayah, mulai dari dayah yang non-tipe hingga dayah yang mendapat tipe A dengan kategori berdasarkan standar yang telah ada.

Berikut daftar jumlah dayah yang telah mendapat akreditasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Jumlah Dayah yang Terakreditasi Tahun 2019

No	Nama Dayah	Pimpinan	Gampong	Kecamatan	Tipe
1	Nurussalam	Tgk. Azmi Syah	Alue Peunawa	Babahrot	Non-Tipe
2	Misbahussalam	Tgk. Baihaqi	Cot Seumantok		Non-Tipe
3	Miftahul Wustha	Tgk. Yusri	Gunung Samarinda		C
4	Darul Mua'alimin	Tgk. Zulkifli Daiyan	Pante Cermin		Non-Tipe
5	Darul Huda	Tgk. Muhammad Musa Tulot	Pante Cermin		C
6	As-Syafiyah	Tgk. Abubakar Al-Bayani	Pante Rakyat		C
7	Nurul A'la	Tgk. M. Aminuddin	Alue Dama	Blangpidie	Non-Tipe
8	Madinatuddinyah Dayah 'Ulumuddin	Tgk. Abu Yazid Al-Yusufi	Babah Lhueng		C
9	Bustanul Huda	Tgk. H. Muhammad Qudusy	Keude Siblah		Non-Tipe
10	Khazanatul Hikam	Tgk. H. Abdurrahman Badar	Kuta Tinggi		B
11	Istiqamatuddin Ulil Albab	Tgk. Mansuriani	Lamkuta		Non-Tipe
12	Dayah Raudhatul Hasanah	Tgk. Jailani	Mata Ie		Non-Tipe
13	Raudhatul Hasanah	Tgk. Damiani Zamzami	Iku Lhung	Jeumpa	C
14	Darul Muhibbah	Tgk. H. Zaini Dahlan Ali	Alue Pisang	Kuala Batee	Non-Tipe
15	Darurri Ayah	Tgk. Abu Rahman MY	Lhok Gajah		Non-Tipe
16	BS Ibnu Sina	Tgk. Muchlis Muhdi, S.Ag.	Padang Sikabu		C
17	Raudhatul Amiin	Tgk. Rugi Al Ghani	Panto Cut		Non-Tipe
18	Baburrahmah	Tgk. Armisli	Teungoh		Non-Tipe
19	Mifthaussalam	Tgk. Awaluddin	Meunasah Teungoh	Lembah Sabil	C
20	Jabal Nur Jadid	Tgk. Armia Diwan, S.Pd.I.	Meurandeh		C
21	Salafiyah Muhibbatul Huda Jadid	Tgk. Aswadi Usman	Ladang Panah	Manggeng	Non-Tipe
22	Darul Ikhlas	Tgk. Abdul Majid	Lhok Pawoh		Non-Tipe
23	Jabalnur	Tgk. Safrizal	Padang Panjang		Non-Tipe
24	Nurul Fata	Tgk. M. Abdul Mukti	Pantee Cermin		Non-Tipe

No	Nama Dayah	Pimpinan	Gampong	Kecamatan	Tipe
25	Raudhatul Munawarrah	Tgk. Kadri	Pantee Perak		Non-Tipe
26	Assalafiyah Al-Waliyah	Tgk. M. Dahlan	Pusu Ingin Jaya		Non-Tipe
27	Firailallah	Uztzh. Siti Zakia Amalia	Kota Murni	Setia	C
28	Darul Mukhlisin	Tgk. M. Judan Nur	Lhang		Non-Tipe
29	Nurul Jamil	Tgk. Muhammad Hadil Umami	Lhang		Non-Tipe
30	Ulumuddiniyah	Tgk. H. Abdussalam Ghaliby	Rambong		B
31	Babussalam	Tgk. M. Dustur Syam	Meunasah	Susoh	Non-Tipe
32	Babul Istiqamah	Ummi Harmijah	Padang Hilir		A
33	Nurul Ihsan	Tgk. Saridin Sulsi	Adan	Tangan-Tangan	C
34	Jidarul Mu'arif	Tgk. Zulkarnaini	Gunong Cut		Non-Tipe
35	Madinatul Fata	Tgk. Nashrullah Aja, S.Pd.I.	Ie Lhop		C
36	Nihayatul Muhtaj	Tgk. Nawawi Hakimis	Padang Bak Jeumpa		C
37	Babul Wusta	Tgk. Mawardi	Padang Bak Jok		Non-Tipe
38	Nurul Mubin	Tgk. Nasruddin	Pante Geulumpang		Non-Tipe
39	Hubbul Wathan	Tgk. Irman	Suak Labu		Non-Tipe

Sumber: Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

5. Indikator Kinerja **“Peningkatan Jumlah Hafidz dan Hafidzah”** ditargetkan sejumlah 1 orang dapat direalisasi sejumlah 6 orang dengan tingkat capaian 600% atau kategori **SangatBaik**.

Peningkatan jumlah hafidz dan hafidzah ini terjadi karena pembinaan yang intens dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Abdyta melalui Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ) serta didukung pula kerjasama yang baik antara para asafiz atau pengajar dengan para peserta yang disiplin dalam menjalankan kegiatan ini, sehingga melahirkan para 6 orang hafidz dan hafidzah yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan MTQ di tingkat Provinsi Aceh.

Adapun nama-nama para hafidz dan hafidzah tersebut seperti tertera dalam tabel di bawah ini :



Gambar 3.3
Kegiatan Pembinaan terhadap Hafidz dan Hafidzah Tahun 2019

Tabel 3.5
Daftar Hafidz dan Hafidzah Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2019

No	Nama	Jumlah Hafalan	Jenis Kelamin
1	Putra Zikril Amin Ganto	1 Juz	Laki-laki
2	Cindy Amalya Putri	1 Juz	Perempuan
3	Egy Farnanda	5 Juz	Laki-laki
4	Haura Sya'bani	5 Juz	Perempuan
5	M. Aulia Caesar Alfina	10 Juz	Laki-laki
6	Nanda Zulhikmah	20 Juz	Laki-laki

Sumber: Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

- Misi 1 : Mengimplementasikan Nilai-Nilai Keislaman dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat serta Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam
- Tujuan 1 : Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Islami dan Berbudaya Keacehan melalui Pelaksanaan Syariat Islam dalam Semua Aspek Kehidupan

No	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Peran Pelaku Seni dan Pelaksanaan Kehidupan Adat dalam Mendukung Pembangunan Masyarakat di Aceh Barat Daya	Persentase Jumlah Sanggar Seni yang Aktif	35%	40%	114,28	Sangat Baik
		Rata-rata Tingkat Capaian			114,28	Sangat Baik

Pada Sasaran Strategis "Meningkatnya Peran Pelaku Seni dan Pelaksanaan Kehidupan Adat dalam Mendukung Pembangunan Masyarakat di Aceh Barat Daya" selama tahun 2019 telah menunjukkan tingkat capaian yang baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 114,28%.

Adapun rincian realisasi target indikator pada sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Indikator Kinerja "**Persentase Jumlah Sanggar Seni yang Aktif**" dari target 35% dapat terealisasi sebesar 40%, dengan tingkat capaian sebesar 114,28%, yang berkategori **Sangat Baik**.

Pembinaan sanggar seni di Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 20 sanggar yang aktif dari 69 sanggar seni dalam menjalankan aktifitas keseniannya dan sering mengikuti acara adat, adapun nama-nama sanggar seni tersebut adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Daftar Sanggar Seni yang Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

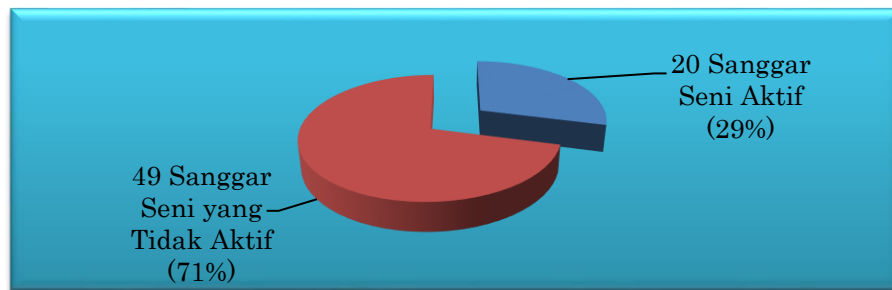
No	Nama Sanggar	Ketua	Alamat
1	Bujang Juara	Nasruddin	Seunelop
2	Zikir Maulid	Tengku Haris	Alue Dama
3	Teater Merah	Yogi	Meudang Ara
4	Dalail khairat	T. Zulkifli	Babahrot
5	Sedati	Iwan	Palak Hulu
6	Seni Sigupai Abdya	Ida Agustina	Blangpidie
7	Bumo Akuistik	Juwaini	Blangpidie
8	KOMUYA	Ibnu Jihat	Blangpidie
9	Kreasi Baru	Fitriani	Blangpidie
10	Mano Pucoek	Mahdaniar	Blangpidie
11	SMPN.1 Babahrot	Hasmiati	Babahrot
12	Jeumpa BanTimoh	Rosmawar	SMPN 1 Kuala Batee
13	Putro Aloeh	Budi Kurniawan	SMPN 1 Jeumpa
14	Payoeng Nangro	Tuti	SMP Tunas Nusa
15	Beudoh Beusare	Nurmi, S.Pd	SMPN 2 Sosoh
16	Anek Laout	Husna	SMPN 1 Susoh
17	Lembah Kila	Musaini	SMPN 1 Blangpidie
18	SMPN.1SETIA	Selfiliani	Lhang
19	Seulanga Dara	CutErlina	Manggeng
20	Jabal Nurjadid	Rahman Ibnu Hasan	Meurandeh

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Abdya Tahun 2020

Kendala yang didapatkan dalam melakukan pembinaan terhadap sanggar seni adalah masih banyaknya sanggar seni yang ada di gampong-gampong yang tidak membuat laporan/mempublikasikan setiap kegiatannya kepada dinas terkait sehingga sulit melakukan pembinaan lebih lanjut baik itu berbentuk sosialisasi maupun pemberian bantuan peralatan kesenian. Namun, untuk perbaikan ke depan, akan dilakukan survey kebutuhan sanggar melalui keuchik (kepala desa) sehingga kita akan dapat mengetahui kebutuhan sanggar dan memfasilitasi dalam kegiatan-kegiatan perlombaan yang diadakan agar kelestaraan budaya daerah senantiasa terjaga.

Persentase jumlah sanggar seni dapat di lihat pada diagram di bawah ini :

Diagram 3.1
Persentase Sanggar Seni Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019



- Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat Daya yang Baik, Bersih dan Berwibawa untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat, Berkualitas dan Berkeadilan Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) >50	50,25	43,60	86,76	Baik
	2. Nilai Rata-rata Capaian SPM Kabupaten	47.85%	46.05%	96.23	Baik
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,00%	74,67%	98.25	Baik
	- Dinas Kesehatan	55,50%	32,73%	58.97	Kurang
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40,46%	27,97%	69.13	Kurang
	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	44,17%	72,34%	163.77	Sangat Baik
	- Satpol PP dan WH	51%	68,63%	134.56	Sangat Baik
	- Dinas Sosial	20%	0%	0	Kewenangan Provinsi
	3. Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100	Baik
	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,3%	9,14%	213	Sangat Baik
	5. % Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	80%	89%	111,25	Sangat Baik
	6. % Usulan Musrenbang yang Terealisasi dalam Rencana Anggaran	75%	36,33%	48.44	Kurang

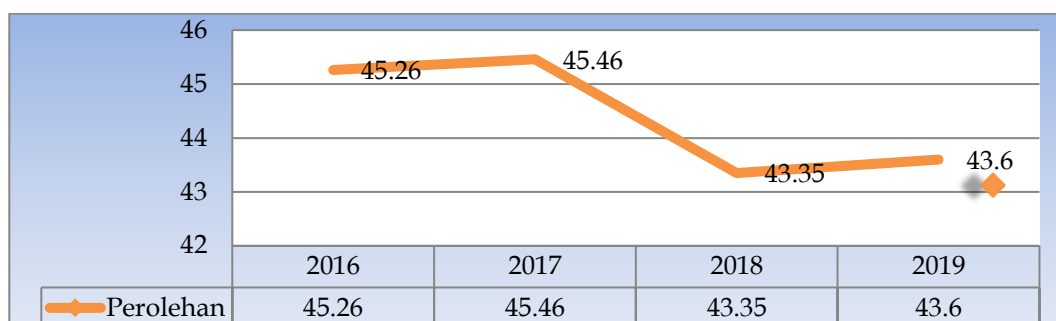
	Kabupaten				
	7. Nilai Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66.66	Cukup
	Rata-rata Tingkat Capaian			103.12	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Sasaran Strategis **“Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi”** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar 103.12% dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) >50”** ditargetkan sebesar >50,52 dan yang dapat terealisasi sebesar 43,60 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 86,76% atau berkategori **Baik**.

Nilai capaian implemtasi AKIP tahun 2019 mengalami penambahan hanya 0,25 dari 43,25 menjadi 43,60. Kenaikan yang tidak terlalu signifikan ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Aceh Barat Daya belum maksimal. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah berkomitmen untuk bisa meningkatkan kinerja sehingga pada laporan kinerja di tahun mendatang bisa ditingkatkan dengan berbagai upaya perbaikan seperti yang direkomendasikan pada hasil evaluasi oleh BPKP dan Kemenpan RB.

Grafik 3.2
Perolehan Nilai AKIP Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode Tahun 2016 – 2019



2. Indikator Kinerja “**Nilai Rata-rata Capaian SPM Kabupaten**” ditargetkan memperoleh nilai rata-rata sebesar 47.85% pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 46.05%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 96.23% atau berkategori **Baik**.

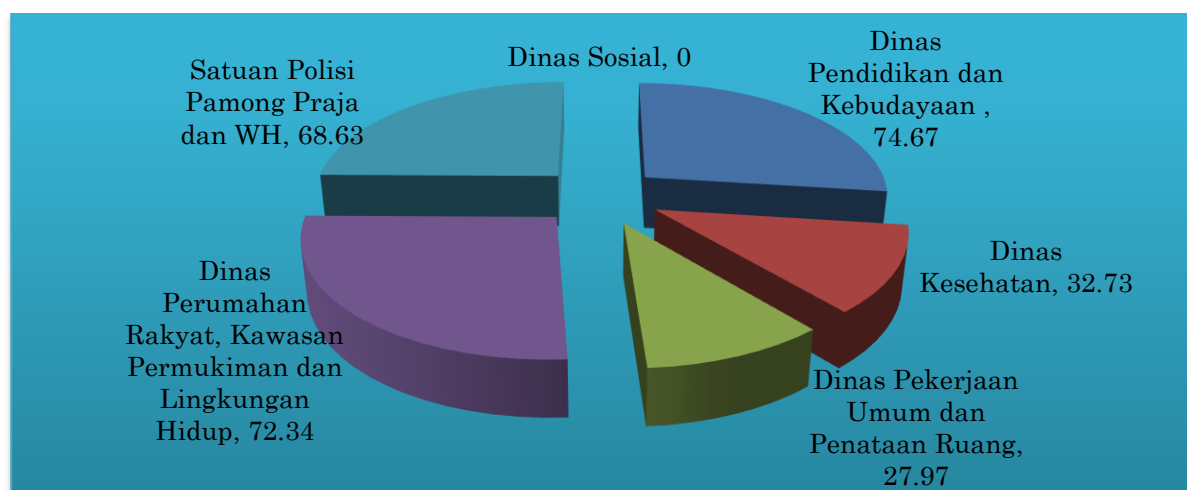
Capaian nilai Standar Pelayanan minimal diperoleh dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama SKPK	% Target	% Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76,00	74,67
2	Dinas Kesehatan	55,50	32,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40,46	27,97
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	44,17	72,34
5	Satpol PP dan WH	51	68,63
6	Dinas Sosial	20	0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian nilai SPM tertinggi diperoleh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 74,67%, sedangkan capaian terendah diperoleh oleh Dinas Sosial sebesar 0%. Adapun penyebab Dinas Sosial tidak memperoleh nilai SPM karena kewenangan dalam merealisasikan target SPM telah beralih menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi.

Persentase capaian realisasi masing-masing dinas teknis terhadap nilai SPM dapat diperlihatkan dalam grafik berikut ini:

Diagram 3.2
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2019



3. Indikator Kinerja “**Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah**” pada tahun 2019 ditargetkan memperoleh opini WTP sesuai dengan target yang diperjanjikan sehingga capaian untuk indikator ini 100% atau berkategori **Baik**.

Tahun 2019 merupakan tahun ke 4 (empat) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pencapaian dalam 4 tahun berturut-turut ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memperbaiki tata kelola keuangan Pemda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.7
Perkembangan Opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
WTD	WTP	WTP	WTP	WTP

4. Indikator Kinerja **“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 4.3% dengan realisasi 9.14%. Artinya bahwa pada indikator ini capaian kinerjanya sebesar 213% atau berkategori **Sangat Baik**.

Secara umum kebijakan dalam perencanaan PAD pada tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan menitikberatkan pada:

- optimalisasi potensi pendapatan dengan tetap tidak memberatkan masyarakat;
- menjaga iklim investasi yang kondusif;
- mudah diterapkan dan dilaksanakan;
- tidak merusak lingkungan; dan
- penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materi serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menggali potensi keuangan daerah dan menentukan kemandirian daerah atas berbagai kebijakan pembangunan. Rincian PAD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019
berdasarkan Jenis Pendapatan

No	Jenis Pendapatan	Target Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Pajak Daerah	6.021.122.000	8.153.620.398	135,417
2	Retribusi Daerah	2.386.378.000	1.699.133.710	71,201
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.500.000.000	1.475.298.733	98,353
4	Zakat	2.700.000.000	3.051.349.822	113,013
5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.678.049.681	93.338.531.769	123,336
Jumlah Total		88.285.549.684	107.717.934.432	122,011

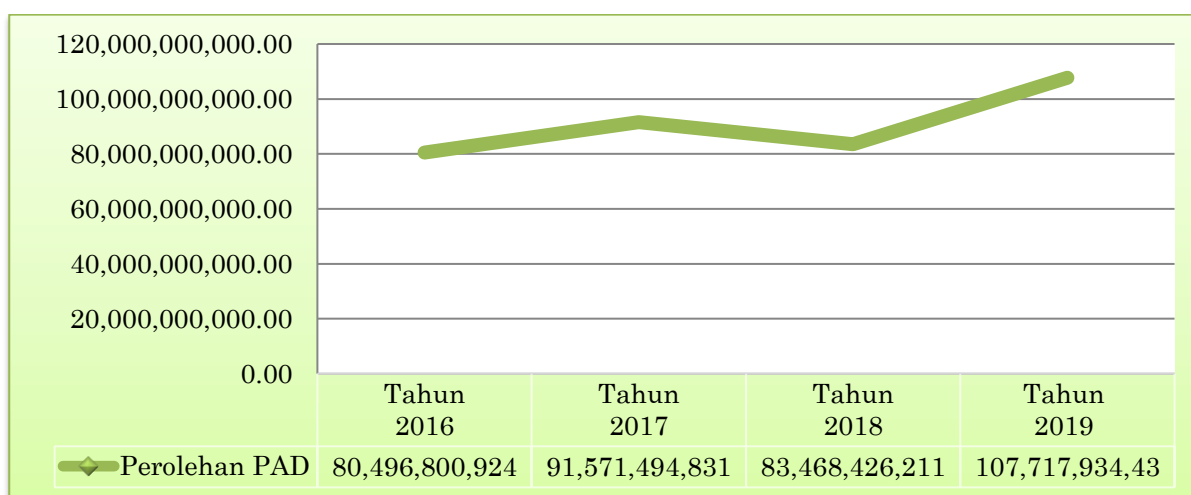
Berikut ditampilkan tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel 3.9
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Barat Daya
periode 2016 – 2019

No	Tahun	Jumlah PAD (Rp)	Peningkatan/ (Penurunan)
1	2016	80.496.800.924,32	
2	2017	91.571.494.831,20	13,75 %
3	2018	83.468.426.211,06	(2,22) %
4	2019	107.717.934.432,00	22,51%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami dinamika fluktuatif sebagaimana grafik di bawah ini:

Grafik 3.3
Perolehan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2016-2019



5. Indikator Kinerja “% Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD” ditargetkan sebesar 80% dan realisasinya sebesar 89% atau capaian kinerjanya sebesar 111.25% dan berkinerja sangat baik.

Ini merupakan capaian kinerja yang diharapkan yaitu melebihi target yang direncanakan, indikator ini ditargetkan sebesar 80% dengan pencapaian sebesar 89%, dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu, maka pada indikator ini mencapai 151,72%, hal ini membuktikan bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir tingkat pencapaian pada indikator ini telah melebihi pencapaian target pada tiap tahunnya. Adapun tingkat pencapaian ini menandakan bahwa dokumen perencanaan 5 (lima) RPJMD Pemerintah Daerah dapat dituangkan dan Sinergi untuk dijabarkan ke dalam Dokumen 1 (satu) tahunan yaitu RKPD, untuk itu prestasi ini untuk dapat dipertahankan untuk memenuhi target kinerja pada setiap Program dan kegiatan sesuai alur perencanaan yang baik.

6. Indikator kinerja “% Usulan Musrenbang yang Terealisasi dalam Rencana Anggaran Kabupaten” yang ditargetkan semula 75% tetapi pada realisasinya hanya 36.33%, artinya pada indikator ini kinerjanya hanya 48.44% atau berkategori Kurang.

Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan masih banyaknya usulan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang belum selaras dan sinergi dengan tema dan rencana kerja pemerintah ke tahun yang akan direncanakan. Kondisi ini mengakibatkan kurang optimalnya sejumlah usulan musrenbang yang tidak dapat diakomodir sesuai program dan kegiatan yang tersedia pada tahun berkenaan. Hal tersebut ditambah lagi dengan usulan para pemangku kepentingan lainnya yang harus pula diakomodir. Dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, maka belum semua usulan yang ada dalam musrenbang mampu ditampung.

7. Indikator kinerja “Nilai Tingkat Maturitas SPIP” ditargetkan memperoleh Level 3 dan hanya mampu direalisasi pada Level 2 dengan tingkat capaian 66.66% atau dengan kategori cukup.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Adapun tingkat maturitas SPIP dapat diterangkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Tingkat Maturitas SPIP

No	LEVEL	STANDAR
1	Level 0 - Belum Ada	Belum Memiliki Kebijakan dan Prosedur
2	Level 1 – Rintisan	Kebijakan dan Prosedur Tertulis
3	Level 2 – Berkembang	- Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur - Kebijakan dan Prosedur Tertulis
4	Level 3 – Terdefinisi	- Implementasi Kebijakan dan Prosedur dan Dokumentasi - Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur - Kebijakan dan Prosedur Tertulis
5	Level 4 - Terkelola dan Terukur	- Evaluasi Formal, Berkala dan Terdokumentasi - Implementasi Kebijakan dan Prosedur dan Dokumentasi - Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur - Kebijakan dan Prosedur Tertulis
6	Level 5 – Optimum	- Pemantauan, Pengembangan Berkelanjutan - Evaluasi Formal, Berkala dan Terdokumentasi - Implementasi Kebijakan dan Prosedur dan Dokumentasi - Pengkomunikasian Kebijakan dan Prosedur - Kebijakan dan Prosedur Tertulis

Sumber : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Belum meningkatnya tingkat maturitas pada indikator ini disebabkan karena ada 6 (enam) elemen penilaian yang belum terpenuhi, yaitu :

- a. peran dan layanan, yaitu audit kinerja/evaluasi program dan jasa konsultasi;
- b. pengelolaan SDM, yaitu koordinasi tim pegawai yang professional dan membangun tim dan kompetensinya
- c. praktek professional, yaitu pada perencanaan pengawasan berbasis resiko dan kerangka kerja mengelola kualitas;
- d. akuntabilitas dan manajemen kinerja, yaitu pada pelaporan manajemen APIP dan informasi biaya serta pengukuhan kinerja;
- e. budaya dan hubungan organisasi, yaitu komponen tim manajemen dan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan; dan
- f. struktur tata kelola, yaitu pada mekanisme pendanaan/penganggaran dan pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP.

Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah

Tujuan : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	1. Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	206.196,27 Ton	202.154.75 Ton	98,03	Baik
	2. Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian	8,3 Ton/Ha	8 Ton/Ha	96,38	Baik
	3. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	32.114/Ton	32.114/Ton	100	Baik
	4. Meningkatnya Luas Lahan Perkebunan	29.314 Ha	28.576 Ha	97,48	Baik
	5. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1.213.268,83/ Kg	1.214.440,30 Kg	100,09	Sangat Baik
	6. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan	14.732 Ton	14.932 Ton	101.35	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				98,88	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 6 (enam) indikator kinerja Sasaran Strategis **"Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan"** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pada sasaran initergolong Baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 98,88%.

Adapun rincian pencapaian setiap indikator pada sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator kinerja **“Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian”** ditargetkan memperoleh 206.196,27 ton hasil pertanian dan terealisasi sebesar 202.154.75 Ton dengan tingkat capaian 98,03% atau kategori **Baik**.

Capaian yang dicapai pada indikator ini sudah sangat baik disebabkan tingginya intervensi dinas teknis seperti pengadaan benih unggul pada waktu dimulainya musim tanam baik gadu maupun rendengan, selanjutnya adanya rehabilitasi serta peningkatan



jaringan irigasi tersier yang mengakibatkan areal sawah dapat teraliri dengan maksimal, disamping itu adanya pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pengoptimalan penggunaan alsintan baik saat pengolahan maupun saat panen. Pada musim tanam (MT) gadu 2019 terjadi sedikit penurunan produksi pertanian dari target yang ditetapkan karena adanya pergeseran MT gadu tahun 2019 sehingga menyebabkan

pergeseran panen MT gadu yang berlanjut pada tahun 2020, maka hasil produksi MT gadu dari luas lahan 10.289 Ha akan dihitung pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan produksi hasil pertanian jika digabungkan dengan padi sebesar 132.417,50 ton, jagung sebesar 4.710 ton, kacang tanah sebesar 80 ton, ubi jalar sebesar 178,50 ton dan komoditi hortikultura lainnya sebesar 64.768,72 ton, maka produksi hasil pertanian mencapai 202.154,72 Ton, dari target tahun 2019 sebesar 206.196,27 Ton dengan realisasi sebesar 202.154,72 Ton atau sebesar 98,04%.

2. Indikator kinerja **“Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian”** ditargetkan memperoleh 8.3 Ton/Ha, dan terealisasi sebesar 8 Ton/Ha dengan tingkat capaian 96,38% atau berkategori **Baik**.



Gambar 3.6
Panen Raya MT Gadu 2019 di Gampong Pisang Kec. Setia
Panen Raya MT Gadu 2019 di Gampong Pisang Kec. Setia
Gambar 3.6

Jika dibandingkan dengan target nasional (6 ton/Ha GKP), maka produktivitas hasil pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya telah melebihi target tersebut atau terealisasi sebesar 8 ton/Ha pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena penggunaan varietas unggul baru (VUB), adanya bantuan pupuk yang memadai, serta adanya pengendalian hama penyakit tanaman yang terarah dan cepat. Disamping itu penggunaan inovasi teknologi yang dilakukan petani sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Namun realisasi 8 ton/Ha tersebut belum memenuhi target yang diperjanjikan pada tahun 2019 sebesar 8,3 ton/Ha disebabkan karena terjadinya pergeseran tanam pada MT gadu tahun 2019 sehingga menyebabkan pergeseran panen MT gadu yang berlanjut pada tahun 2020.

3. Indikator kinerja **“Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan”** ditargetkan memperoleh 32.114/Ton dan dapat direalisasi 32.114/Ton dengan tingkat capaian 100% atau kategori **Baik**.

Ada beberapa komoditi tanaman perkebunan yang terus dikembangkan di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu tanaman kelapa sawit, pala, pinang, kopi, kelapa dalam, karet, kakao, nilam, cengkeh, sagu dan tanaman lain-lain. Tantangan yang dihadapi oleh para petani perkebunan yang dapat menurunkan hasil produksi adalah hama dan penyakit, pemupukan dan pemeliharaan tanaman yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan hasil perkebunan di tahun-tahun mendatang akan mengalami penurunan.

4. Indikator kinerja **“Meningkatnya Luas Lahan Perkebunan”** ditargetkan memperoleh 29.314 Ha dengan realisasi seluas 28.576 Ha dengan tingkat capaian 97,48% atau kategori **Baik**.

Peningkatan luas lahan perkebunan sangat diperlukan mengingat program Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki program dalam mengembangkan beberapa komoditas baru, diantaranya pengadaan bibit pinang betara dan kopi ateng. Dan pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah berhasil merealisasikan perluasan lahan perkebunan seluas 28.576 hektar. Meskipun capaian ini belum memenuhi target, namun telah menunjukkan hal yang cukup baik.

5. Indikator kinerja **“Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan”** ditargetkan memperoleh 1.213.268,83 Kg dan dapat direalisasi 1.214.440,30 Kg dengan tingkat capaian 100,09% atau kategori **Sangat Baik**.

Terjadinya kenaikan sebesar 0,09%, pada indikator ini disebabkan adanya peningkatan produksi daging dan peningkatan populasi ternak pada 9 (sembilan) kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang secara langsung berpengaruh terhadap produksi. Keberhasilan ini terjadi didukung oleh adanya penyaluran atau pendistribusian bantuan ternak pemerintah kepada masyarakat melalui pembinaan kelompok-kelompok ternak, pelaksanaan inseminasi buatan (IB) dan Upsus Siwab, pelaksanaan program vaksinasi secara periodik terjadwal serta adanya penyuluhan terhadap para peternak yang dilakukan secara berkala. Disamping itu bagusya koordinasi dari tingkat peternak, inseminator, petugas lapangan dan koordinator Kabupaten. Rincian produksi hasil peternakan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Jenis Ternak	Jumlah Produksi (Kg)
1	Kerbau	168.375
2	Sapi Potong	93.411,5
3	Kambing	54.837,5
4	Domba	5.325
5	Ayam Buras	269.293
6	Ayam Ras Pedaging	332.520,48
7	Ayam Ras Petelur	198.283,82
8	Itik	92.394
Jumlah		1.214.440,30

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

6. Indikator kinerja “**Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan**” ditargetkan memperoleh 14.732 ton dan dapat direalisasikan sebanyak 14.932 ton dengan tingkat capaian 101,35% atau kategori **Sangat Baik**.

Peningkatan produktivitas perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, adapun usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, revitalisasi tambak dan kolam rakyat serta penyebaran benih ikan untuk perikanan budidaya.



Gambar 3.7
Pengadaan Alat Tangkap Nelayan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019

Tabel 3.12
Produksi Perikanan (Laut, Budidaya dan Perairan)
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

KECAMATAN	PRODUKSI (TON)						
Subdistrict	Laut	Budidaya Kolam	Budidaya Tambak	Perairan Umum	Unit Pengolahan Ikan	Pugar	Jumlah
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Manggeng	2.120,00	6,39	243,60	8,12	88,37	33,17	2.499,65
Lembah Sabil	3.273,00	4,64	2,52	3,05	-	41,20	3.324,40
Tangan-Tangan	2.251,00	4,12	1,12	3,25	-	-	2.259,49
Setia	201,00	2,16	12,83	3,34	-	21,63	240,96
Blangpidie	-	3,09	-	9,14	29,56	-	41,79
Jeumpa	-	5,15	-	2,33	-	-	7,48
Susoh	6.514,00	12,46	310,25	9,14	45,84	-	6.891,68
Kuala Batee	373,76	16,69	173,25	8,63	19,88	-	592,20
Babahrot	-	21,84	-	9,14	-	-	30,97
Jumlah	14.732,76	76,53	743,57	56,12	183,65	96,00	15.888,62

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah

Tujuan 2 : Mengembangkan Lembaga Keuangan Syari'ah di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Mewujudkan Kemudahan Akses Permodalan dan Pasar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1. Prosentase Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,7%	4,74%	100,85	Sangat Baik
	2. Prosentase Koperasi Aktif	25 Unit	51 unit	204	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				152.42	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 2 (dua) indikator kinerja Sasaran Strategis **“Mewujudkan Kemudahan Akses Permodalan dan Pasar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”** diperoleh pencapaian kinerja dengan kategori **Sangat Baik** dengan capaian 152.42%.

Adapun rincian masing-masing indikator dari sasaran strategis tersebut adalah:

1. Indikator kinerja **“Prosentase Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi”** ditargetkan naik 4,7% dan yang terealisasi adalah 4,74% dengan capaian 100,85% atau berkategori sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedikit yakni tercapai dengan pertumbuhan sebesar 4,68% atau meningkat sebesar 0.06%. Pertumbuhan tersebut masih di atas sangka pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh yang tumbuh sebesar 4,15%.

2. Indikator kinerja **“Prosentase Koperasi Aktif”** ditargetkan sebanyak 25 unit dengan realisasi sebanyak 51 unit dengan capaian kinerja yaitu 204% atau berkategori **Sangat Baik**.

Tingginya pencapaian pada indikator ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dalam melakukan pembinaan secara aktif terhadap koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Aktifnya suatu koperasi salah satunya dapat diukur apabila dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Dari 177 koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat 51 koperasi aktif. Walaupun demikian, tinjauan terhadap capaian kinerja indikator ini sudah sangat baik dimana jumlah koperasi yang aktif melebihi target yang rencanakan yaitu 25 unit.

Berikut data koperasi aktif berdasarkan kelompok usaha yang dikelola di Kabupaten Aceh Barat Daya

Tabel 3.13
Kondisi Kelompok Koperasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

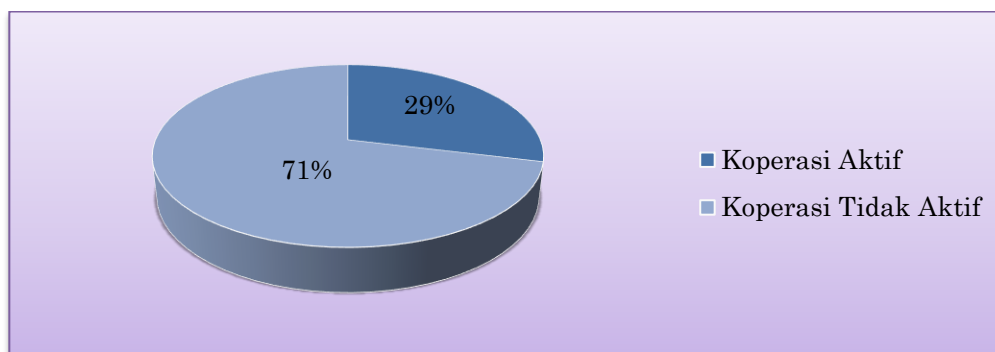
No	Kelompok Koperasi	Koperasi Unit			Jumlah Anggota
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
1	Koperasi Pertanian	4	11	15	621
2	Koperasi Perkebunan	1	6	7	359
3	Koperasi Nelayan	5	8	13	560
4	Kopinkra	1		1	37
5	Koppontren	1	6	7	301
6	Koperasi Karyawan	1	4	5	165
7	Koperasi Angkatan Darat	1		1	197
8	Koperasi Kepolisian	1		1	264
9	Koperasi Serba Usaha	7	50	57	2.539
10	Koperasi Pasar	1	4	5	154
11	Koperasi Simpan Pinjam	2	2	4	106
12	Koperasi Pegawai	20	4	24	2.280

No	Kelompok Koperasi	Koperasi Unit			Jumlah Anggota
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
	Negeri				
13	Koperasi Wanita	4	3	7	283
14	Koperasi Wedratama	1		1	68
15	Koperasi Pepabri	1		1	17
	Jumlah	51			

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Ka. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Persentase perbandingan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram 3.3.
Persentase Perbandingan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019



Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran Strategis 6	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terwujudnya Pembangunan Kawasan Ekonomi Agro-Maritim dan Tumbuhnya Sentra-sentra Industri Pengolahan dalam Rangka Menciptakan Lapangan Kerja Baru	Jumlah BUMG yang Memiliki Kapasitas untuk Mengelola Usaha-usaha Pasca Panen	4 Gampong	3 Gampong	75	Cukup
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	60 Orang	75 Orang	125	Baik
	Prosentase Penurunan Angka Kemiskinan	16,10%	16,29%	101,18	Sangat Baik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,10%	4,30%	138,70	Sangat baik
	Rata-rata Tingkat Capaian			109,97	Sangat baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja Sasaran “Terwujudnya Pembangunan Kawasan Ekonomi Agro-Maritim dan Tumbuhnya Sentra-sentra Industri Pengolahan dalam Rangka Menciptakan Lapangan Kerja Baru” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 109,97% atau berkategori **Sangat Baik**.

Adapun rincian capaian untuk masing-masing indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja “**Jumlah BUMG yang Memiliki Kapasitas untuk Mengelola Usaha Usaha Pasca Panen**” dengan target 4 gampong pada tahun 2019 dan terealisasi hanya 3 gampong dengan capaian kinerja untuk indikator 75% atau berkategori **Baik**.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) atau secara nasional disebut BumDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMG sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi gampong secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga gampong. Istilah BumDes atau secara lokal Aceh disingkat dengan BUMG muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 dan rinciannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010.

BUMG merupakan wadah usaha gampong yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah gampong dengan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan gampong itu sendiri. Sebelum lahirnya kebijakan di atas, inisiatif BUMG sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi akses masyarakat terhadap air.

Bupati Aceh Barat Daya dalam kapasitasnya membuat sebuah kebijakan strategis dalam pengelolaan dana gampong melalui peraturan bupati tentang pengelolaan dana gampong yang menitikberatkan bahwa 50% anggaran gampong harus ditujukan pada sektor pemberdayaan ekonomi.

Di Kabupaten Aceh Barat Daya dari 152 gampong seumuanya telah memiliki BUMG, namun dalam pelaksanaannya tidak semua BUMG berjalan sebagaimana yang diharapkan. Untuk lebih rincinya jumlah BUMG per kecamatan dan yang telah menjalankan usaha pasca panen dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Jumlah BUMG yang Mengelola Usaha Pasca Panen
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah BUMG	Jumlah BUMG yang Mengelola Usaha Pasca Panen
1	Babahrot	14	14	
2	Kuala Batee	21	21	
3	Jeumpa	12	12	
4	Susoh	29	29	1
5	Blangpidie	20	20	

No	Kecamatan	Jumlah	Jumlah BUMG	Jumlah BUMG yang Mengelola Usaha PascaPanen
6	Setia	9	9	
7	Tangan-Tangan	15	15	
8	Manggeng	18	18	2
9	Lembah Sabil	14	14	
	JUMLAH	152	152	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai tahun 2019, dari 152 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya, baru 3 (tiga) BUMG yang menjalankan usaha pengolahan usaha pascapanen. Yaitu di Kecamatan Susoh 1 (satu) BUMG dan di Kecamatan Manggeng 2 (dua) BUMG. Pada Kecamatan Manggeng BUMG yang mengelola usaha pascapanen terdapat pada Gampong Seuneulop dengan nama BUMG Pelangi Indah, dan pada Gampong Padang Baru dengan nama BUMG Punyo Kito, pada dua gampong ini BUMGnya sama-sama menjalankan usaha penggilingan padi, sedangkan untuk Kecamatan Susoh terdapat pada Gampong Barat dengan Kue-Kue Kering dengan nama BUMG Bersama Sejahtera.

2. Indikator kinerja **“Jumlah Kunjungan Wisatawan”**, dengan target sebanyak 60 orang dapat direalisasikan sebanyak 75 orang, dapat disimpulkan pada indikator ini tingkat capaiannya adalah 125% atau berkategori **Sangat Baik**.

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Aceh Barat Daya umumnya dikunjungi oleh wisatawan domestik (dalam negeri) dan terjadi lonjakan biasanya pada hari-hari besar seperti hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, hari libur panjang, satu hari menjelang puasa dan hari-hari besar lainnya. Para wisatawan ini mengunjungi objek wisata yang terdapat di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Disamping itu kunjungan wisatawan juga sering dilakukan jika ada event-event tertentu yang diselenggarakan di Abdya seperti salah satunya event



Tabel 3.15
Destinasi Wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

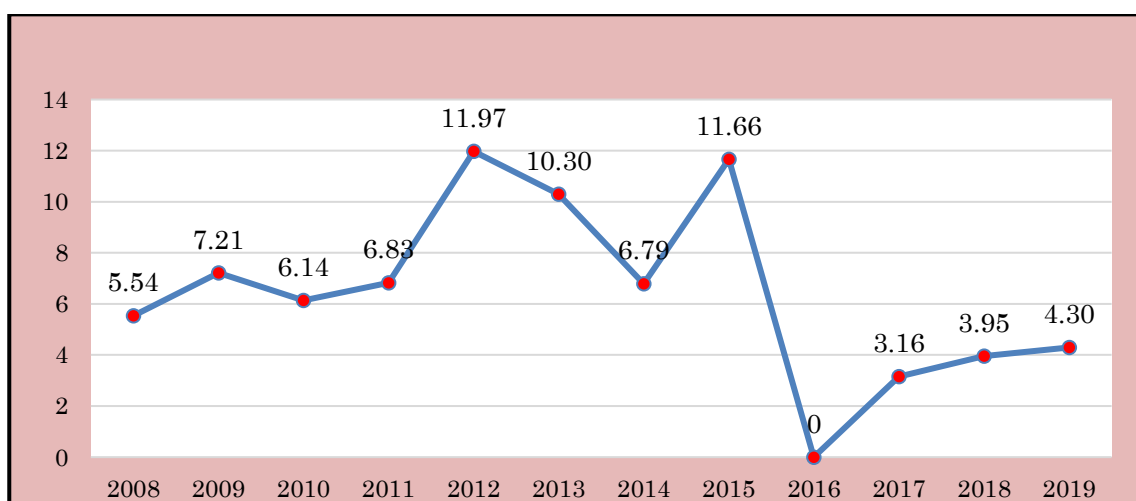
No.	Lokasi / Kecamatan	Nama Tempat Wisata	Objek Wisata	Jenis Wisata
1.	Lembah Sabil	- Pemandian Krueng Baru	- Pemandian Krueng Baru Pantai Ujung Tanah dan Alue Rambot Pemandangan Puncak Batee Iee	Wisata Alam
2.	Manggeng	- Pantai Wisata Ujong Ketapang	- Teupin Batee Taman Laut Ujung - Manggeng - Pantai Ujung Manggeng - Pasir Butiran Lhok Pawoh	Wisata Alam
3.	Tangan-Tangan	- Pantai Wisata Aron Tumpang	- Pantai Wisata Blang Padang - Kuburan Batee Meuculek - Air Terjun Alue Kareng - Mon Jeue - Panorama alam	Wisata Alam dan Sejarah
4.	Setia	- Pantai	- Pantai Mon Mameh Pantai Wisata Kuta - Meurandeh - Pantai Ujong Kuala - Jerat Teuku Gunong Jerat	Wisata Alam dan Sejarah
5.	Blangpidie	- Pemandian Krueng Susoh	- Kolam Tgk.Malem - Batee Permata Pemandian Kolam Putroe Hijau - Gunong Cot Keummeunyan Panorama Gunong dan Irigasi Mata Ie - Makam T.Awee Geutah - Makam T.Peukan - Makam Tgk.Dilubuk - Makam Tgk. Sirah Panyang - Makam T.Ben Mahmud - Makam Syeh Mahmud	Wisata Alam dan Sejarah
6.	Susoh	- Pasir Putih Pantai Cemara Indah	- Kuala Katung - Pantai Wisata Nelayan - Pasir Ujong Keutapang - Pulau Gosong - Taman Laut Ujong Serangga	Wisata Alam

No.	Lokasi / Kecamatan	Nama Tempat Wisata	Objek Wisata	Jenis Wisata
7.	Kuala Batee	Pantai Wisata - Lama Tuha Situs Kerajaan - Kuala Batee	- Taman Laut Lama Tuha - Pemandian Air Terjun - Pantan Cut - Pantai Lama Muda - Situs Peninggalan Bersejarah Portugis - Makam Tgk.Djakfar Lailon	Wisata Alam, Budaya dan Sejarah
8.	Babahrot	- Krueng Babahrot - Wisata Perkebunan	- Raja Malaka - Krueng Seumayam - Perkebunan Sawit	Wisata Alam dan Sejarah

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

- Indikator Kinerja **“Prosentase Penurunan Angka Kemiskinan”** ditargetkan penurunannya sebesar 16,10% dan pada tahun 2019 terjadi penurunan angka kemiskinan, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kemiskinan sebesar 16,29% sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah 101,18% dengan kategori **Sangat Baik**.
- Indikator kinerja **“Tingkat Pengangguran Terbuka”** dengan target kinerja sebesar 3,10% dan pada tahun 2019 yang terealisasi menjadi 4,30% dengan capaian kinerja sebesar 61,29% hal ini menggambarkan kinerja yang cukup.

Grafik 3.4
Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2008 – 2019



Penilaian terhadap indikator ini adalah penilaian negatif dalam pemahaman makin kecil capaiannya makin baik kinerjanya, sebenarnya target 3,95 adalah sesuai pencapaian indikator penurunan angka pengangguran terbuka pada tahun 2018 sehingga pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menargetkan tingkat pengangguran terbuka lebih kecil lagi dari angka 3,95%, namun dalam realisasinya tingkat pengangguran terbuka yang terealisasi masih di atas 3,1% yaitu pada angka 4,3%. Walau capaian ini tidak sesuai target tapi masih dibawah target tahun 2018 dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya waktu pada saat itu menargetkan Tingkat Pengangguran terbuka turun pada angka 9%.

Penurunan angka Pengangguran terbuka ini yang belum mencapai target diperkirakan karena turunnya harga Tandan Buah Segar Komoditas Kelapa Sawit secara global pada tingkat paling rendah, sehingga berdampak pada sektor-sektor yang lain seperti Daya beli menurun dan tingkat pengangguran sedikit meningkat.

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi masyarakat

Sasaran Strategis 7	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terwujudnya Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Strategis	1. Peningkatan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	5.000	8.500	170	Sangat Baik
	2. Luas Layanan Daerah Irigasi Teknis Kabupaten	3.100 Ha	973,23 Ha	31,39	Cukup
	3. Rasio Panjang Jalan Kabupaten Per Jumlah Kendaraan	50 Unit/Km	39 Unit/Km	78	Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				93,13	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator kinerja Sasaran “**Terwujudnya Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Strategis**” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja berkategori Baik dengan persentase capaian sebesar 93,13.

Adapun perincian capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis tersebut adalah:

1. Indikator kinerja “**Peningkatan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik**”. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menargetkan 5.000 Km jalan yang ditingkatkan menjad kondisi baik dan terealisasi menjadi 8.500 Km sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator ini berkategori **Sangat Baik** dengan persentase capaian sebesar 170%.

Kondisi umum sistem transportasi jalan berdasarkan pengamatan dan data-data mengenai sistem jaringan jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah jaringan jalan regional di Provinsi Aceh yang menunjukkan ruas-ruas jalan utama yang

menghubungkan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan kabupaten/kota lain yang ada barat dan selatan Aceh dan ke utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues. Dengan demikian, maka jaringan jalan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal, tetapi juga melayani arus lalu lintas eksternal. Lalu lintas eksternal yang dimaksud adalah lalu lintas yang masuk/keluar Kabupaten Aceh Barat Daya dan lalu lintas yang hanya melintas Kabupaten Aceh Barat Daya.

Target pembangunan dan peningkatan jalan yang akan dibangun pada tahun 2019 sepanjang 5.000 meter, namun untuk mengejar target pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RTRW sesuai dengan RPJM perlu dilakukan penambahan pembangunan jalan, karena tahun ini sudah terpenuhi untuk anggaran APBK Murni sehingga dapat kita tingkatkan penambahan pembangunan jalan tahun ini dalam APBK-P pada akhir tahun realisasi pembangunan tahun 2019 sepanjang 8.500 meter. Penambahan ini dengan harapan dapat membantu target daerah untuk pembangunan jalan jangka menengah yang tertuang didalam RPJM daerah.

Tabel 3.16
Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah Ruas	Panjang Jalan (Km)	Lapisan Perkerasan				Kondisi Jalan		
				Aspal	Beton	Kerikil	Tanah	Baik	Sedang	Rusak
1	Pusat	2	63,61	63,7	0	0	0	0	0	0
2	Provinsi	2	31,64	10,12	0	15,75	2,2	14,29	5,75	6,76
3	Kabupaten	695	748,67	261,96	10,27	316,7	159,75	221,83	50,39	476,44
Jumlah			843,92	335,78	10,27	332,45	161,95	236,12	56,14	483,2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

- Indikator kinerja **“Luas Layanan Daerah Irigasi Teknis Kabupaten”** dengan target 3.100 Ha dan pada tahun 2019 yang terealisasi sebesar 973,23 Ha dengan tingkat capaian 31,39 atau berkategori **Kurang**.

Rendahnya realisasi pada indikator ini disebabkan oleh ada beberapa areal persawahan yang tidak dapat dialiri oleh pengairan irigasi karena areal tersebut berada di daerah ketinggian dan jauh dari aliran irigasi yang ada sehingga areal persawahan seperti ini hanya bergantung pada air hujan (tadah hujan) dengan sistem tanam padi lading atau huma. Disamping faktor alam tersebut, faktor lainnya adalah pendangkalan dan rusaknya beberapa jaringan irigasi sehingga tidak mampu menyimpan air saat terjadi musim kemarau.

Adapun solusi untuk permasalahan ini adalah dengan menambah alokasi anggaran yang cukup untuk memperbaiki jaringan irigasi yang telah rusak/dangkal dan memberikan bantuan alsintan berupa pompa air sehingga mampu mengalir daerah-daerah yang berada di ketinggian.

Tabel 3.17
Luas Lahan Sawah Berdasarkan Klasifikasi Irigasi
Per Kecamatan Di Kabupaten Aceh Barat Daya

Kecamatan	Luas Lahan Sawah Berdasarkan Klasifikasi Sumber Irigasi				
	Teknis	Semi Teknis	Sederhana	Tadah Hujan	Total
1. Babahrot	964	44	71	9	1.088
2. Kuala Batee	-	909	680	275	1.864
3. Jeumpa	250	330	360	39	974,2
4. Susoh	952,45	37,15	28,30	37,3	1.055,2
5. Blangpidie	657,27	53,24	5,89	-	716,4
6. Setia	571	-	579,2	1	1.151,2
7. Tangan-Tangan	907,37	69,72	681,61	-	1.658,7
8. Manggeng	-	945	150	90	1.185
9. Lembah Sabil	265,03	256	60,67	10	591,7
Jumlah	4.567,1	2.644,11	2.616,67	455,1	10.289,4

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

3. Indikator Kinerja “**Rasio Panjang Jalan Kabupaten Per jumlah Kendaraan**” dengan target 50 Unit/Km yang terealisasi adalah 39 Unit/Km sehingga pencapaian kinerjanya adalah sebesar 78% dengan kategori **Baik**.

Kabupaten Aceh Barat Daya sangat mengandalkan transportasi darat untuk menunjang berbagai macam kegiatan ekonomi dalam wilayahnya, sehingga apabila terjadi kendala pada transportasi darat maka dipastikan daerah akan mengalami kesulitan mengembangkan daerahnya.

Menurut statusnya jalan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Jalan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
- Jalan Provinsi yang pembinaannya dilakukan oleh provinsi;
- Jalan kabupaten/kota yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Adapun menurut kondisinya jalan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

- Jalan baik, yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan 60 Km/jam selama 2 tahun tanpa pemeliharaan jalan;
- Jalan sedang; yaitu jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40 Km/jam dan selama setahun tanpa ada rehabilitasi; dan
- Jalan rusak; yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan hanya 20 – 40 Km/jam dan perlu segera direnovasi.

Jalan kabupaten pada tahun 2019 sepanjang 1.024 Km atau terjadi peningkatan sepanjang 276,3 km dari tahun 2018, sedangkan jumlah kendaraan tahun 2019 sebanyak 39.754 unit atau terjadi peningkatan sebanyak 2.204 unit.

- Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
- Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis 8	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terwujudnya Pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Barat Daya	1. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dengan RTRW	6%	5%	83,33	Baik
Rata-rata tingkat Capaian				83,33	Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Sasaran Strategis **“Terwujudnya Pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Barat Daya”** dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tergolong baik dengan rata-rata persentase capaian sebesar 83,33% dan berkategori **Baik**.

Adapun penjelasan dari capaian indikator kinerja dari sasaran strategis itu adalah:

1. **Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dengan RTRW** dengan target 6% dan dapat direalisasi 5% dengan tingkat capaian sebesar 83,33 atau berkinerja **Baik**. Sesuai dengan target yang tertera, maka dapat diperjelas bahwa target utama adalah sebesar 5% dengan uraian sebanyak 1 program/kegiatan sedangkan nilai target sebanyak 6% adalah penjumlahan nilai target tidak tercapai tahun 2018 s.d. tahun 2019. Untuk target 2019 adalah terlaksana sepenuhnya yaitu sebanyak 1 program dan kegiatan yang bernilai 5%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu terjadi peningkatan sebanyak 1 %, sedangkan nilai capaian kinerja yang tidak terealisasi pada tahun lalu sebesar 1 % belum dapat direalisasikan pada tahun ini, karena tidak adanya program/kegiatan tambahan yang terealisasi pada tahun ini. Perbandingan realisasi kinerja indikator ini sampai pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, maka dapat dikatakan sejalan, mengingat realisasi kinerja tahunan terlaksana dengan persentase yang maksimal. Berdasarkan evaluasi Dinas PUPR, maka penyebab dari kegagalan yang mengakibatkan penurunan kinerja adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas dan terbatasnya fasilitas. Secara garis besar, program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sudah tersedia dengan lengkap, namun pada saat

tertentu program penunjang tersebut tidak berjalan seiring dengan program kegiatan utama dan hal ini sering menjadi penyebab kegagalan kinerja

- Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Wilayah Sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
- Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Sesuai Kebutuhan Wilayah Sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis 9	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terlaksananya Pengelolaan Sektor SDA Sesuai Peruntukan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	1. % Korban Bencana yang Menerima Bantuan Tanggap Darurat	90%	63, 63%	70,7%	Cukup
Rata-rata Tingkat Capaian				70,7%	Cukup

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran “**Terlaksananya Pengelolaan Sektor SDA Sesuai Peruntukan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana**” dapat disimpulkan rata-rata tingkat capaiannya adalah 70,7% dengan kategori cukup.



Gambar 3.8
Penyerahan Bantuan Masa Panik Korban Bencana Alam Tahun 2019
oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya

Adapun rincian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. **% Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Tanggap Darurat** dari target 90% yang terealisasi adalah sebesar 63,63% dengan tingkat capaian Kinerja 70,7% atau berkategori cukup, Dari data yang disebutkan di atas, realisasi target menurun, tetapi hal ini tidak sama sekali menunjukkan kinerja yang menurun dikarenakan dalam menjalankan target realisasi, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya saat menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada masyarakat yang terdampak bencana tidak serta merta langsung memberikan bantuan, namun menerapkan kriteria tingkat bencana dan dampak yang dialami oleh korban bencana, sehingga pada akhirnya tidak semua masyarakat korban bencana dapat diberikan bantuan tanggap darurat sesuai dengan standar bencana yang dapat diberikan bantuan.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menangani bencana dan korban bencana bekerja sama dengan berbagai komponen dan lembaga, salah satunya adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana). Pada bulan November 2019, Tagana Kabupaten Aceh Barat Daya telah membentuk relawan hingga tingkat desa/gampong dan hal tersebut diklaim sebagai yang pertama di Indonesia dengan harapan agar setiap terjadi bencana, maka pertolongan bisa dilakukan lebih cepat dengan motto “dimana ada bencana, di situ ada Tagana”.



Tabel 3.18
Bencana Alam dan Jumlah Kerusakan yang Ditimbulkan
Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Akibat Bencana					Ket
			Korban Jiwa	Kerusakan				
				Rumah	Lahan	Jembatan	Lain- lain	
1	Lembah Sabil	Kebakaran			2			
		Angin Kencang		2				
2	Manggeng	Kebakaran		1	1			
		Angin Kencang		8				
3	Tangan- Tangan	Banjir				1		Jembatan Ie Lhop
		Kebakaran		2				

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Akibat Bencana					Ket
			Korban Jiwa	Kerusakan				
				Rumah	Lahan	Jembatan	Lain-lain	
		Angin Kencang		1				
4	Setia	Banjir				1		Jembatan Belly Ujung Tanah
		Angin Kencang		1				
5	Blangpidie	Kebakaran	1	3	2		3	
		Angin Kencang		2				
6	Susoh	Kebakaran	2	5	1		1	
		Angin Kencang		3				
7	Jeumpa	Kebakaran					1	
8	Kuala Batee	Kebakaran		2				
9	Babahrot	Kebakaran		1	4			
		Longsor		1				Rusak berat

Sumber : BPBK Aceh Barat Daya Tahun 2020

- Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Memberikan Dukungan Maksimal terhadap Pendidikan Formal dan Informal
- Tujuan 1 : Menyelenggarakan Pendidikan Formal, Non-Formal dan Informal Berbasis Konsep Pendidikan Islami yang Meningkatkan Relevansi, Kualitas, Tata Kelola, dan Aksesibilitas Pendidikan di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Kualitas Pendidikan pada Semua Jenjang yang Memiliki Daya Saing Tingkat Nasional maupun Regional	Angka Rata-rata Lama Sekolah				
	1. Angka Partisipasi Murni				
	a. SD/MI	80%	82%	102,5	Sangat Baik
	b. SMP/MTs	70%	62,97%	89,95	Baik
	2. Angka Partisipasi Kasar				
	a. SD/MI	87,53%	88,33%	100,91	Sangat Baik
	b. SMP/MTs	85,47%	85,12%	99,59	Baik
	3. Angka Melek Huruf	97,12%	97,12%	100	Baik
	4. Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Islami	2%	5,07%	253,5	Sangat Baik
	5. Angka Kelulusan				
	a. SD/MI	100%	100%	100	Baik
	b. SMP/MTs	100%	93,72%	93,72	Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				134,31	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Pendidikan pada Semua Jenjang yang Memiliki Daya Saing Tingkat Nasional maupun

Regional” tingkat capaian sasaran strategis ini adalah 134,31% dengan kategori **Sangat Baik**.

Adapun rincian capaian dari masing-masing indikator pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

1. **Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD/MI** ditargetkan 80% pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 82% dengan tingkat capaian sebesar 102,5% atau berkategori sangat baik. Sedangkan **Angka Partisipasi Murni pada tingkat SMP/MTs** ditargetkan 70% dengan realisasi sebesar 62,97% dengan tingkat capaian sebesar 89,95% atau berkategori baik.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah angka persentase anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam 3 kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk 7-12 tahun, SMP untuk penduduk yang usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

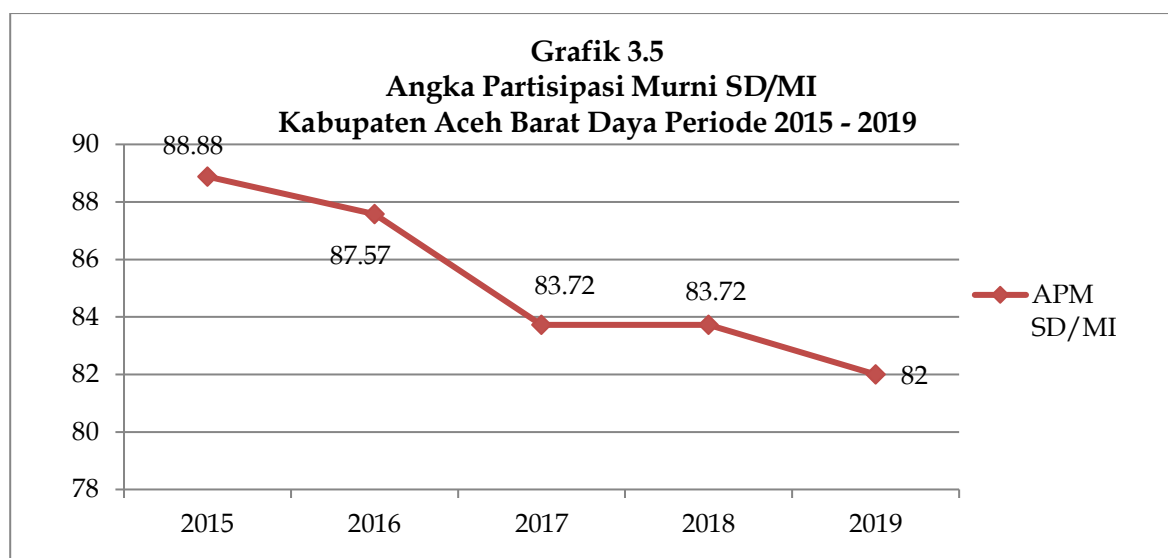
Realisasi APM untuk usia SD/MI di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 -2019 dapat ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Usia SD/MI periode 2015 – 2019

Angka Partisipasi Murni	Periode				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	88,88	87,57	83,72	83,72	82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berikut ini ditampilkan grafik APM untuk usia SD/MI di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 - 2019



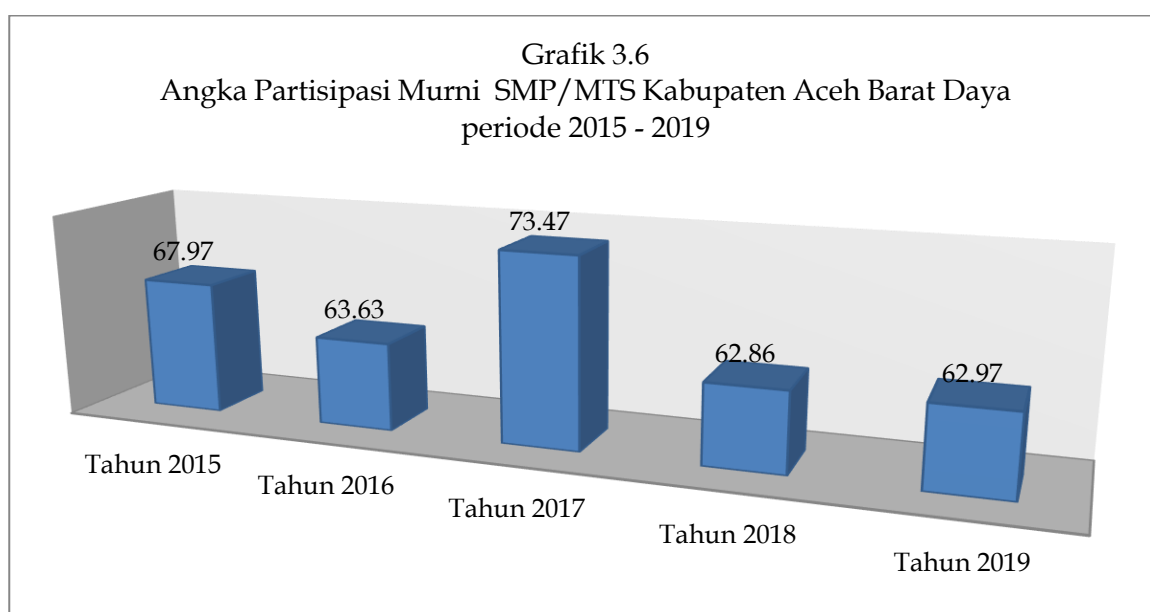
Realisasi Angka Partisipasi Murni untuk usia SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 -2019 dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.20
Realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Usia SMP/MTs
periode 2015 – 2019

Angka Partisipasi Murni	Periode				
	2015	2016	2017	2018	2019
SMP/MTs	67,97	63,63	73,47	62,86	62,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berikut ini ditampilkan grafik Angka Partisipasi Murni untuk usia SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 – 2019



2. **Angka Partisipasi Kasar** pada tingkat SD/MI ditargetkan 87,53% pada tahun 2019 dengan realisaasi sebesar 88,33% dengan tingkat capaian sebesar 100,91% atau berkategori **Sangat Baik**, sedangkan Angka Partisipasi Kasar pada tingkat SMP/MTs ditargetkan 85,47% pada tahun 2019 dengan realisaasi sebesar 85,12% dengan tingkat capaian sebesar 99,59% atau berkategori **Baik**.

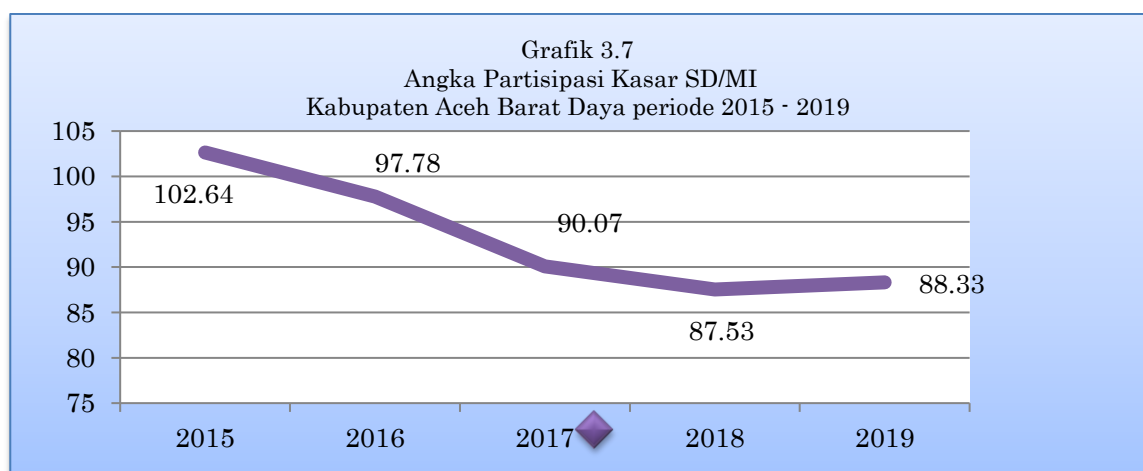
Realisasi Angka Partisipasi Kasar untuk usia SD/MI di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015 -2019 dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.21
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Usia SD/MI periode 2015 – 2019

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Kategori
SD/MI	102,64	97,78	90,07	87,53	87,53%	88,33	100,91	Sangat Baik

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berikut ini ditampilkan grafik Angka Partisipasi Kasar untuk usia SD/MI di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015-2019



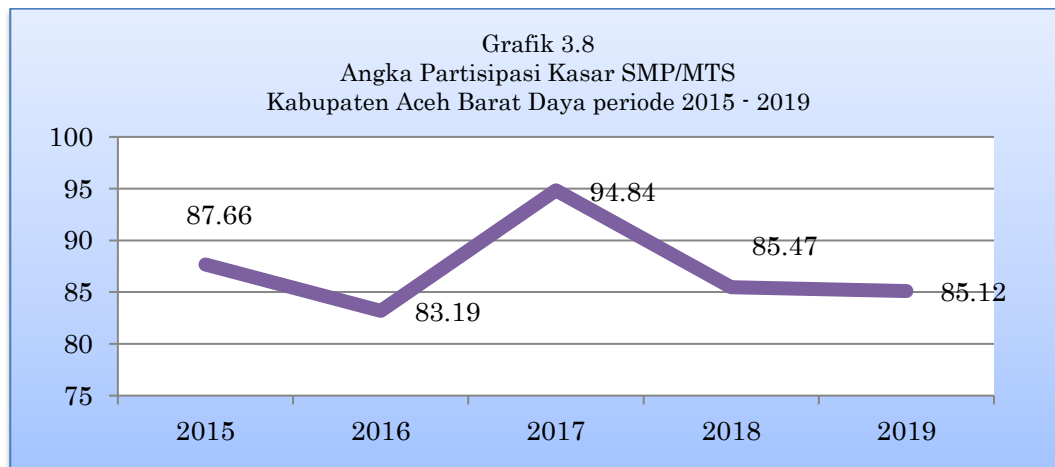
Realisasi Angka Partisipasi Kasar untuk usia SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat Daya priode 2015 -2019 dapat ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Usia SMP/MTs periode 2015 – 2019

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Kategori
SMP/MTS	87,66	83,19	94,84	85,47	85,47	85,12	99,59	Baik

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berikut ini ditampilkan grafik Angka Partisipasi Kasar untuk usia SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015-2019:



3. **Angka Melek Huruf** ditargetkan sebesar 97,12% dengan realisasi sebesar 97,12% dengan tingkat capaian 100% atau kategori **Baik**.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk 15 tahun ke atas. Indikator angka melek huruf dihitung dengan membandingkan (100% dikurangi jumlah buta aksara usia 15-24 tahun) dengan jumlah penduduk usia 15-24 tahun.

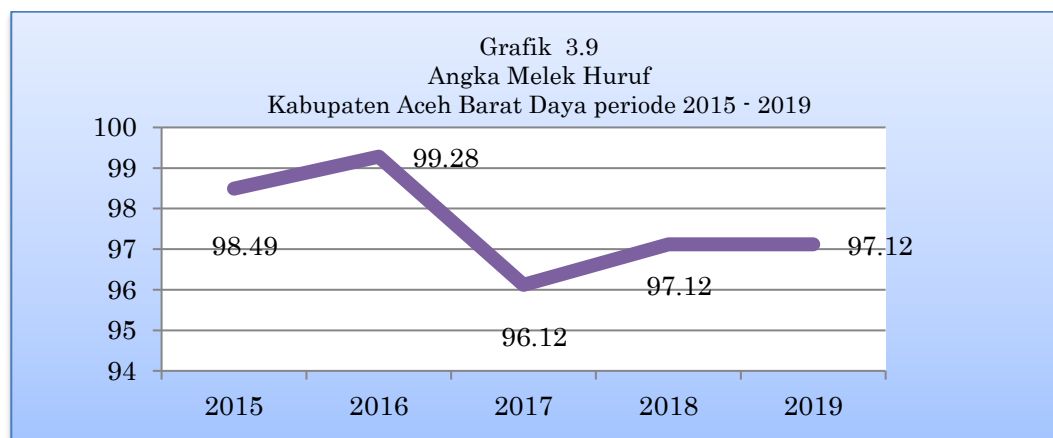
Dalam perencanaan pembangunan wilayah, angka melek huruf digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan, AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Berikut ditampilkan realisasi capaian angka melek huruf di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2015-2019

Tabel 3.23
Realisasi Angka Melek Huruf periode 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Kategori
Angka Melek Huruf	98,49	99,28	96,12	97,12	97,12	97,12	100	Baik

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam lima tahun terakhir terjadi tren yang naik turun dan cenderung tetap. Pada tahun 2019 angka melek huruf persentasenya sama dengan tahun 2018.

4. **Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Islami** dengan target 2% yang terealisasi di atas rencana yaitu sebesar 5,07% dengan tingkat capaian indikator sebesar 253,5 berkategori **Sangat Baik**.

Seiring perkembangan zaman dan mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah beragama Islam, minat masyarakat dalam memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang berbasis Islam cenderung meningkat dari tahun ke tahun bahkan melebihi target yang diperkirakan. Dari 137 jumlah sekolah (terdiri dari 108 SD dan 29 SMP) yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat 15 SD dan 12 SMP yang telah menerapkan pendidikan islami.

Pada dasarnya sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan islami ini juga menerapkan kurikulum standar nasional, namun dalam proses pembelajaran lebih banyak menerapkan akhlak dan etika sesuai ajaran Islam. Pembekalan ilmu agama Islam kepada anak-anak sangat penting agar tercipta masyarakat yang baik dan bertaqwa kepada Allah *Subhanahuwata'ala*.

Tabel 3.24
Daftar Sekolah Yang Telah Menerapkan Pendidikan Islami
Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Pelajaran 2018/2019 Ganjil

No	NPSN	Nama Lembaga Pendidikan	Alamat
1	10104784	SDN 1 Lembah Sabil	Jln. Nasional No. 72 Desa Meurandeh
2	10104868	SDN 1 Manggeng	Jln. Tr. Iskandar Desa Seunelop
3	10104786	SDN 1 Tangan-Tangan	Jln. Nasional Tapaktuan-Meulaboh Desa Padang Bak Jeumpa
4	10104872	SDN 1 Setia	Jln. Nasional Tapaktuan-Meulaboh Desa Rambong
5	10104897	SDN 1 Blangpidie	Jln. Persada No. 57 Desa Keude Siblah
6	10104993	SDN 2 Blangpidie	Jln. Persada No. 103 B Desa Keude Siblah
7	-	SD IT RABBANI Qur'ani	Jln. Iskandar Muda

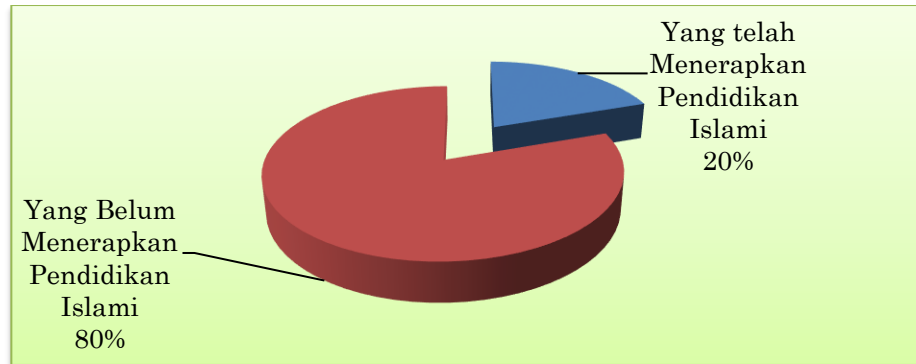
No	NPSN	Nama Lembaga Pendidikan	Alamat
8	10104915	SDN 1 Susoh	Jln. Letkol BB Jalal Desa Pantai Perak
9	10104875	SDN 6 Susoh	Jln. Komplek Cemara Indah Desa Padang Baru
10	10110521	SDN Unggul Tunas Abdya	Jln. Nasional Blangpidie - Meulaboh Desa Ujong Padang
11	10104907	SDN 1 Jeumpa	Jln. Blangpidie - Meulaboh Desa Alue Sungai Pinang
12	10104832	SDN 5 Jeumpa	Jln. Guhang - Cot Mane Desa Ladang Neubok
13	10104787	SDN 8 Jeumpa	Jln. Nyak Makam Lr. Geulumpang Sakti Desa Padang Geulumpang Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya
14	10104809	SDN 1 Kuala Batee	Jln. Mesjid Safinatussalamah Desa Pasar Kota Bahagia
15	10104914	SDN 1 Babahrot	Jln. Nasional Blangpidie - Nagan Raya Desa Pante Rakyat
16	10104861	SMPN 1 Blangpidie	Jl. Iskandar Muda No 77 Desa Geulumpang Payong
17	10104839	SMPN 1 Susoh	Jln. Letkol BB. Djalal Desa Pantai Perak
18	10110524	SMPN Unggul Tunas Nusa	Jln. Nasional Blangpidie - Meulaboh Desa Ujong Padang
19	10104857	SMPN 1 Setia	Jln. Nasional Blangpidie Meulaboh Dusun Sejahtera Desa Lhang
20	10104838	SMPN 1 Tangan-Tangan	Jln.Tanjung Bunga Desa Gunong Cut
21	10104840	SMPN 1 Manggeng	Jalan Pasar No. 4 Desa Kedai
22	10104841	SMPN 1 Kuala Batee	Jl. Blangpidie Meulaboh-Tapak Tuan Km 18 Desa Pasar Kota Bahagia
23	10104842	SMPN 1 Jeumpa	Jl. Nasional Blangpidie-Meulaboh Desa Cot Manee
24	10104843	SMPN 1 Babahrot	Jl. Nasional Meulaboh-Tapak Tuan Desa Pante Rakyat
25	10110525	SMP Swasta Jabal Nur Jadid	Pondok Pesantren Jabal Nurjadid Desa Meurandeh
26	69755764	SMP Swasta Babul Istiqamah	Jln. Letkol BB Djalal Desa Padang Hilir
27	69901824	SMP Swasta Babussalam	Jln. Cut Aloh no. 25 Kemukiman Sangkalan Desa Meunasah

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berikut ditampilkan diagram persentase lembaga pendidikan yang telah menerapkan pendidikan islam dan dan yang belum menerapkan pendidikan islami tingkat SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

Diagram 3.4

Persentase Perbandingan Lembaga Pendidikan yang telah Menerapkan Pendidikan Islami dan yang Belum Menerapkan Pendidikan Islam Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019



5. **Angka Kelulusan pada tingkat SD/MI** dengan target 100% yang terealisasi 100% juga, ini berarti bahwa capaian kinerjanya adalah 100% atau berkategori **Baik**. Sedangkan **Angka Kelulusan pada Tingkat SMP/MTs** dari target 100% yang terealisasi adalah sebesar 93,72% dengan tingkat capaian indikator sebesar 93,72% juga atau berkategori **Baik**.

Angka kelulusan menjadi salah satu indikator atau tolok ukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Angka kelulusan siswa pada tahun 2019 untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs pencapaiannya baik.

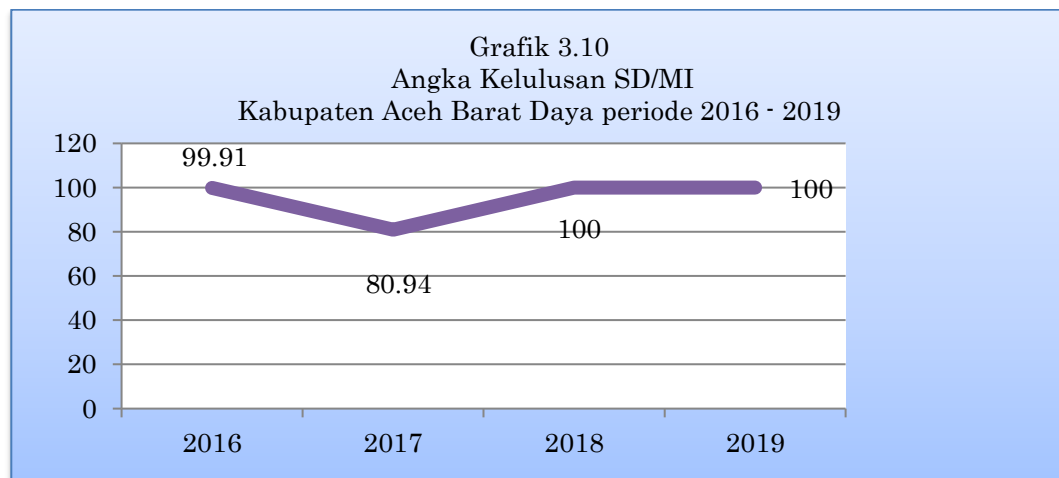
Tabel 3.25

Daftar Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode 2016 - 2019

Uraian	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Kategori
Angka Kelulusan SD/MI	99,91	80,94	100	100	100	100	Baik

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berikut ditampilkan data dan grafik persentase angka kelulusan tingkat SD/MI di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016 – 2019.

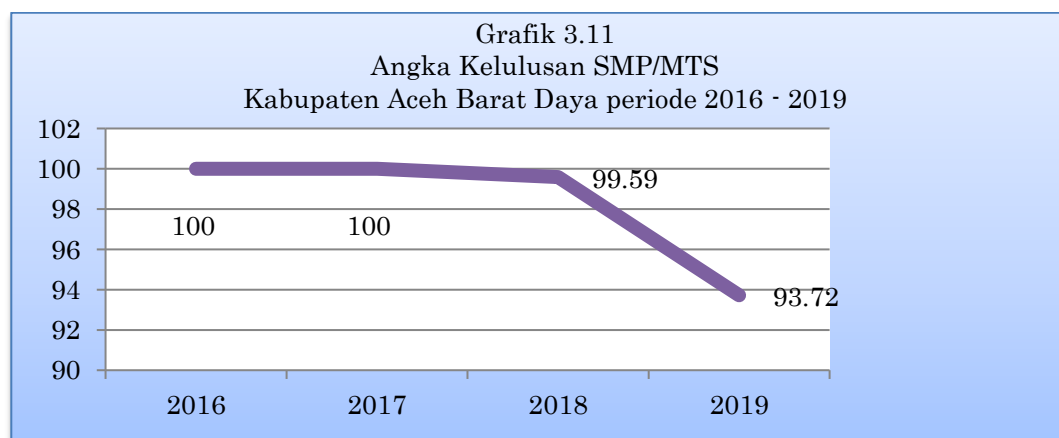


Adapun persentase angka kelulusan tingkat SMP/MTs di Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2016-2019 dapat dijabarkan dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.26
Daftar Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode 2016 – 2019

Uraian	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Kategori
Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	99,59	100	93,72	93,72	Baik

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020



- Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas untuk Mewujudkan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Sehat
- Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 11	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Mampu Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh Barat Daya	1. Umur Harapan Hidup	64,51 Tahun	64,51 Tahun	100	Baik
	2. Angka Kematian Bayi Per 1.000 LH	6	4	133,33	Sangat Baik
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1.000 LH	2	1	150	Sangat Baik
	4. Kasus Gizi Buruk	0 Kasus	0	100%	Baik
	5. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	1 Unit	1 Unit	100%	Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				116,66%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Mampu Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh Barat Daya**” dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis ini sangat baik dengan persentase capaian sebesar 116,66%.

Adapun penjabaran dari capaian masing-masing indikator dari sasaran strategis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

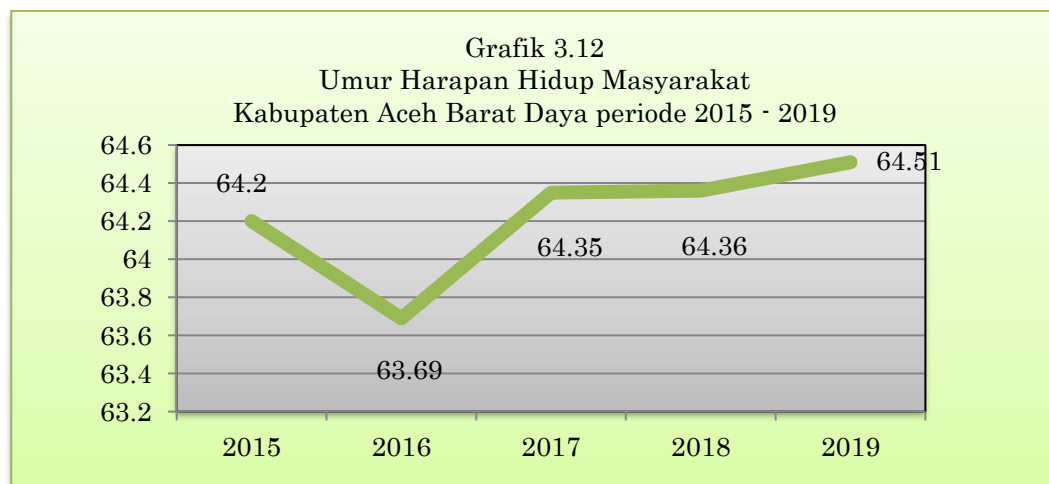
- Indikator Kinerja **Umur Harapan Hidup** masyarakat Aceh Barat Daya ditargetkan rata-rata berumur 64,51 Tahun pada tahun 2019 dengan realisasi dalam kisaran 64,51 tahun dengan tingkat capaian 100%.
Pencapaian umur harapan hidup menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama pada sektor kesehatan, gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Umur harapan hidup di Aceh Barat Daya pada tahun 2019 mencapai 64,51 tahun sesuai target yang diharapkan. Umur harapan hidup masyarakat Aceh Barat Daya cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan masyarakat, namun demikian secara nasional umur harapan hidup penduduk Aceh Barat Daya masih di bawah standar nasional yaitu 72 tahun.
Selama periode 2015 – 2019 umur harapan hidup menunjukkan peningkatan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.27
Umur Harapan Hidup Di Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode 2015– 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian	Kategori
Umur Harapan Hidup	64,2	63,69	64,35	64,36	64,51	64,51	100	Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, umur harapan hidup masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan tren naik turun (fluktuatif), seperti digambarkan pada grafik di bawah ini:



Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terus berupaya meningkatkan angka umur harapan hidup, namun cenderung masih mengalami naik turun, keadaan ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain riwayat medis keluarga, faktor lingkungan dan keadaan ekonomi serta pola hidup yang tidak sehat.

- Indikator Kinerja “**Angka Kematian Bayi Per 1.000 LH**” dengan target 6 dan dapat direalisasi 4 dengan tingkat capaian 133,33% atau berkategori **Baik**.

Indikator kematian bayi merupakan indikator dengan progress negatif dimana semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah capaian kinerja.

Angka kematian bayi merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup).

Berikut kami sajikan tabel angka kematian bayi kabupaten aceh barat daya dari tahun 2017 – 2019 per 1.000 Kelahiran Hidup

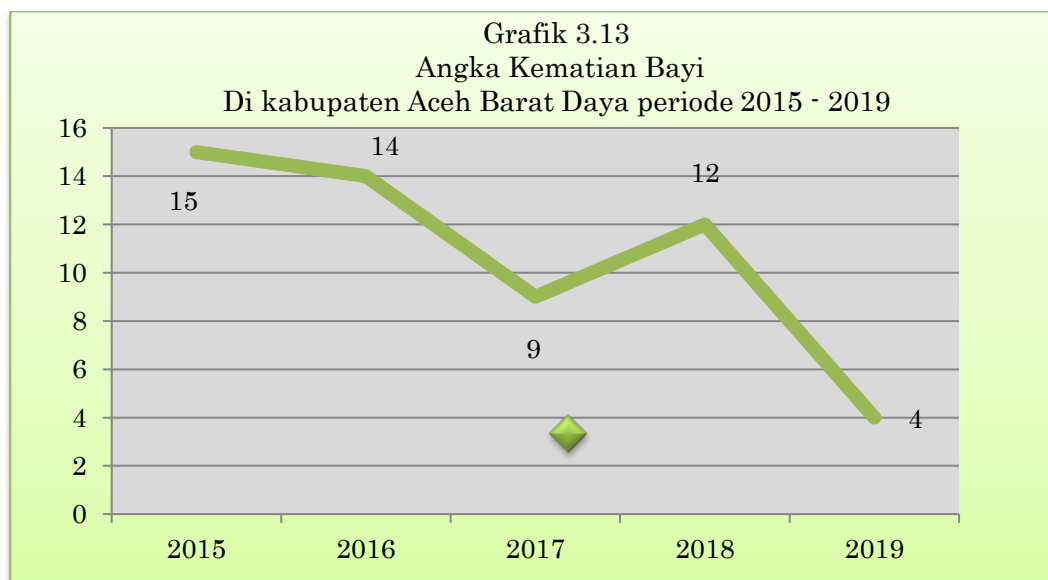
Tabel 3.28
Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode 2015– 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian	Kategori
Angka Kematian Bayi	15	14	9	12	6	4	133,33	Sangat Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di kabupaten Aceh Barat Daya menurun dan realisasi target tahun 2019 mengalami peningkatan.

Secara grafik angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat digambarkan sebagai berikut:



Realisasi angka kematian bayi bila dibandingkan dengan target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), angka kematian bayi termasuk ke dalam *goals* ke 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bayi semua orang disegala usia, dengan target pada tahun 2030 diharapkan angka kematian bayi sekitar 12/1000 Kelahiran Hidup, sehingga jika dibandingkan dengan SDGs, maka Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Barat Daya masih rendah dan ini cukup baik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lini terdepan terus berusaha menekan angka kematian bayi melalui program dan kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita serta melakukan berbagai upaya diantaranya:

- Koordinasi dengan berbagai *stakeholder* dalam rangka menetapkan kebijakan program dan penyediaan anggaran program kesehatan ibu serta pemenuhan sumber daya manusia;

- Pembinaan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka peningkatan kompetensi pelayanan kesehatan;
- Kegiatan audit maternal dan perinatal di Puskesmas dan Poned;
- Pembangunan dan pemenuhan sarana dan prasarana Poskesdes sebagai sarana mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil;
- Pembinaan dan magang medis, paramedis Puskesmas;
- Pendampingan ibu hamil di kecamatan; dan
- Kegiatan KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak).

3. Indikator Kinerja **Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1.000 LH** dengan target 2 orang yang sepanjang tahun 2019 dengan realisasi 1 kasus kematian ibu melahirkan, sehingga pada indikator ini dapat dikatakan bahwa pencapaian berkategori **Sangat Baik** dengan tingkat capaian 150%.

Berikut kami sajikan tabel angka kematian Ibu Melahirkan di kabupaten aceh barat daya dari tahun 2017-2019 per 1000 Kelahiran Hidup:

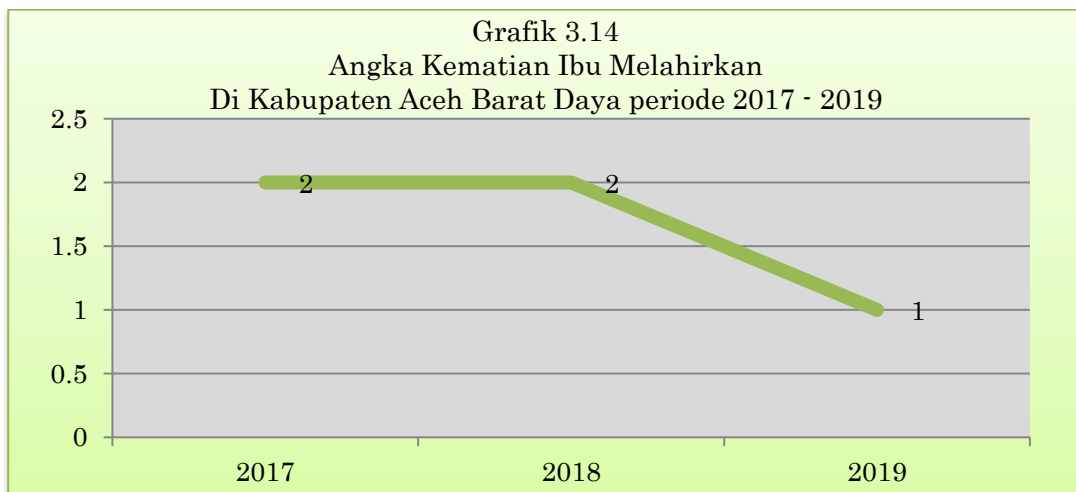
Tabel 3.29
Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode 2015– 2019

Indikator Kinerja	2017	2018	Target 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian	Kategori
Angka Kematian Ibu Melahirkan	2	2	2	1	150	Sangat Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Angka kematian ibu melahirkan di Aceh Barat Daya per 1.000 Kelahiran Hidup sepanjang Tahun 2019 menunjukkan angka yang sangat menggembirakan yaitu 1 kematian per 1.000 LH, dari ditetapkan 2 angka kematian.

Berbagai program kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Kesehatan untuk terus menekan angka kematian ibu melahirkan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian yang menggembirakan ini diantaranya usia produktif ibu, lingkungan, keadaan sosial ekonomi serta adat budaya. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu melahirkan sama dengan program dan upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi yang telah diuraikan di atas.



4. Indikator Kinerja **Kasus Gizi Buruk** dengan target 0 Kasus dan realisasinya sama seperti yang ditargetkan yaitu 0 kasus, dan persentase tingkat capaian adalah 100% atau berkategori **Baik**.

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan balita tersebut, gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak sesusianya, berat badannya rata-rata 60-80 persen dari berat badan ideal.

Ciri-ciri klinis yang biasa menyertainya antara lain:

- Kenaikan berat badan berkurang dan terus menurun;
- Ukuran lingkar lengan atas menurun;
- Maturasi tulang terlambat;
- Rasio berat badan terhadap tinggi normal cenderung menurun; dan
- Tebal lipit kulit normal semakin berkurang.

Berikut kami sajikan tabel kasus gizi buruk pada balita di Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2015 – 2019.

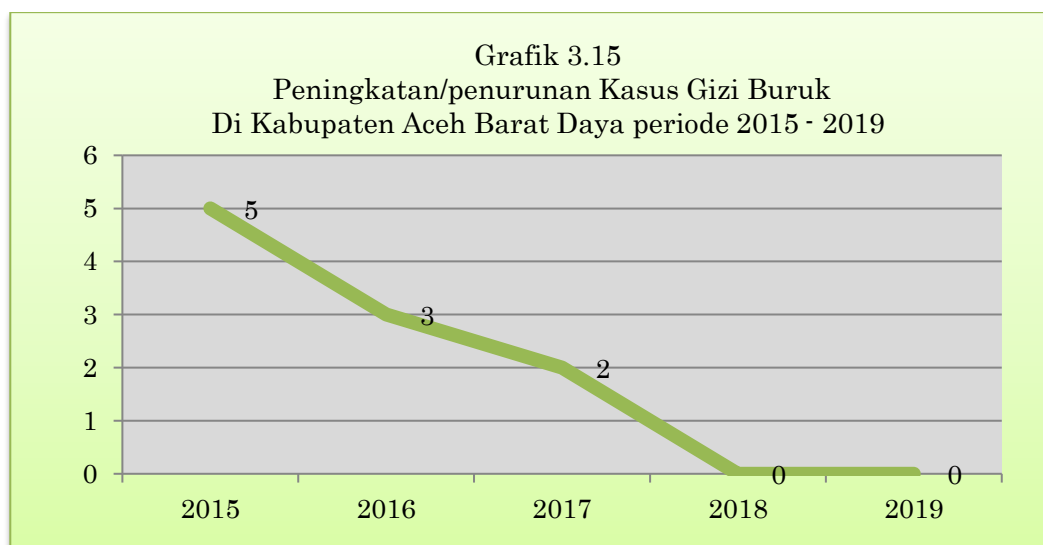
Tabel 3.30
Kasus Gizi Buruk pada Balita di Kabupaten Aceh Barat Daya
Periode 2015– 2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	Target 2019	Realisasi Tahun 2019	% Capaian	Kategori
Kasus Gizi Buruk pada Balita	5	3	2	0	0	0	100	Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

Angka kasus gizi buruk pada balita di Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2019 menunjukkan angka yang sama dengan tahun 2018 dimana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah berhasil menekan angka gizi buruk pada balita, dalam dua tahun terakhir tidak terjadi kasus gizi buruk pada balita.

Pencapaian ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Dinas Kesehatan selaku *leading sector* dalam menekan angka gizi buruk pada balita telah melakukan berbagai upaya diantaranya memberikan makanan tambahan dan pemeriksaan lanjutan pada balita, sehingga jika ditemukan ada gejala seorang balita mengalami gizi buruk seperti tanda-tanda yang disebutkan di atas, maka pemerintah dapat melakukan penanganan secepatnya.

5. Indikator Kinerja **Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi** dengan target 1 Unit dan dapat direalisasikan sebanyak 1 Unit dengan tingkat capaian **100%** atau berkategori **Baik**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas didefinisikan bahwa Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehari-hari bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan Kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko, pada tahun 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya menargetkan 1 (satu) Puskesmas mendapat akreditasi, yaitu Puskesmas Ie Mirah Kecamatan Babahrot.

Dengan telah dilaksanakannya proses akreditasi terhadap 1 (satu) Puskesmas pada tahun 2019 berarti Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah melaksanakan proses akreditasi Puskesmas terhadap seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan data-data sebagai berikut:

Tabel 3.31
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya yang Telah Terakreditasi
Sampai Tahun 2019

No	Puskesmas	Status Akreditasi	Tahun Akreditasi
1	Babahrot	Sudah	2018
2	Ie Mirah	Sudah	2019
3	Kuala Batee	Sudah	2017
4	Alue Pisang	Sudah	2018
5	Jeumpa	Sudah	2017
6	Susoh	Sudah	2017
7	Sangkalan	Sudah	2018
8	Blangpidie	Sudah	2017
9	Lhang	Sudah	2018
10	Tangan-Tangan	Sudah	2018
11	Bineh Krueng	Sudah	2018
12	Manggeng	Sudah	2017
13	Lembah Sabil	Sudah	2018

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020

- Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial
- Tujuan 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial Di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 12	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tersedianya Kebutuhan untuk Masyarakat Rentan Terkait Pangan, Perumahan, Air Bersih, Energi, Santunan Melahirkan dan Bantuan Hukum	1. Panjang Saluran Lingkungan yang Dibangun	6.500 M	8.178,13 M	125,81	Baik
	2. Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Listrik	99%	99%	100%	Baik
	Rata-rata Tingkat Capaian			112,90	Baik

Pada sasaran strategis “Tersedianya Kebutuhan untuk Masyarakat Rentan terkait Pangan, Perumahan, Air Bersih, Energi, Santunan Melahirkan dan Bantuan Hukum” tingkat capaian kinerja sasaran tergolong sangat baik yaitu sebesar 112,90%.

Adapun pencapaian dari masing-masing indikator pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **Panjang Saluran Lingkungan yang Dibangun** ditargetkan sepanjang 6.500 M yang terealisasi sepanjang 8.178,13 M, sehingga pencapaian indikator tergolong **Sangat Baik** yang jauh melampaui target yang direncanakan yaitu dengan persentase capaian sebesar 125,81%.

Pembangunan saluran lingkungan terkait dengan permasalahan sanitasi, hambatan yang dihadapi antara lain terbatasnya sarana infrastruktur pengolahan air limbah, pengolahan sampah, masih terdapatnya genangan sebagai kurang optimalnya fungsi drainase, meningkatnya kebutuhan air bersih masyarakat tidak sebanding dengan debit suplai air bersih serta masih rendahnya kesadaran masyarakat mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya telah menargetkan pembangunan saluran lingkungan sepanjang 6.500 M pada tahun 2019 dengan realisasi melebihi target yaitu sepanjang 8.178,13 M yang tersebar di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dengan pembangunan saluran tersebut diharapkan lacarnya distribusi air sehingga menghindari lingkungan permukiman dari genangan air yang berakibat banjir dimusim penghujan serta terhindar dari penyakit malaria.

2. Indikator Kinerja **“Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Listrik”** pada tahun 2019 ditargetkan 99% rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya memanfaatkan energi listrik. Pada realitanya memang hampir semua rumah tangga sudah menggunakan energi listrik, sehingga pada indikator ini pencapaian target indikator baik sebesar 100%.

Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial

Tujuan 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial Di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 13	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
Terpenuhinya Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Aceh Barat Daya	Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial				
	1 Disabilitas	120 Orang	102 Orang	85%	Baik
	2 Fakir Miskin	10.000 Orang	11.752 Orang	117,52%	Sangat Baik
	3 Anak Yatim/ Yatim Piatu	2.900 Orang	2.789 Orang	96,17%	Baik
	Rata-rata Tingkat Capaian			99,56	Baik

Pada sasaran strategis **“Terpenuhinya Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Aceh Barat Daya”** pencapaian tergolong baik sebesar 99,56%.

Adapun perincian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **“Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Disabilitas)”** ditargetkan 120 orang penyandang cacat yang mendapat bantuan sosial, dan selama

tahun 2019 hanya 102 orang yang mendapat bantuan sosial, pada indikator ini pencapaian indikator tergolong **Baik** sebesar 85%.

2. Indikator Kinerja “**Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Fakir Miskin)**” ditargetkan 10.000 orang fakir miskin yang akan menerima bantuan sosial pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan sosial kepada 11.752 orang, sehingga pada indikator ini pencapaiannya **Sangat Baik** yaitu sebesar 117,52%.
3. Indikator Kinerja **Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial (Anak Yatim/Yatim Piatu)** pada tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menargetkan dapat menyalurkan bantuan sosial kepada 2.900 orang anak yatim atau yatim piatu, dan pada realisasinya tersalurkan bantuan sosial kepada 2.789 orang anak yatim atau anak yatim piatu, jadi pencapaian kinerja pada indikator ini tergolong **Baik** yaitu sebesar 96,17%.

Misi 9 : Meningkatkan Kreatifitas Kepemudaan dan Kebijakan yang Responsif Gender

Tujuan 1 : Membentuk Generasi Muda Aceh Barat Daya yang Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat, Berjiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Berjiwa Kebangsaan

Sasaran Strategis 14	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Terwujudnya Pemuda Aceh Barat Daya yang Mandiri, Aktif dan Berprestasi	1. Jumlah Wirausaha Muda	8 Orang	32 Orang	400	Sangat Baik
	2. Cabang Olahraga yang Berprestasi	7 Cabang	8 Cabang	114,29	Sangat Baik
	3. Persentase OKP yang Aktif	45%	45%	100	Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				204,76	Sangat Baik

Pencapaian kinerja pada sasaran strategis “**Terwujudnya Pemuda Aceh Barat Daya yang Mandiri, Aktif dan Berprestasi**” sangat baik sebesar 204,76.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing kategori dari sasara strategis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja “**Jumlah Wirausaha Muda**” ditargetkan sebanyak 8 orang wirausaha muda pada tahun 2019 terjadi lonjakan jumlah pengusaha muda di Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu sebanyak 32 orang, sehingga lonjakan jumlah pengusaha muda ini mengakibatkan pencapaian indikator ini **Sangat Baik** atau sebesar 400%. Terjadinya peningkatan jumlah wirausaha muda salah satunya disebabkan karena peran dan pembinaan seperti pelatihan dari pemerintah daerah kepada para wirausaha muda agar mampu berdikari dalam memajukan usaha yang mereka geluti.

Para wirausaha muda/pemula di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2019 dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.32
Jumlah Wirausaha Muda di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Nama UMKM	Nama Pimpinan	Gampong	Kecamatan
1	UD. Juriati	Juriati	Keude Siblah	Blangpidie
2	UD. Rohani	Rohani	Keude Siblah	Blangpidie
3	UD. Nurdiana	Nurdiana	Meudang Ara	Blangpidie
4	UD. Marhamah	Marhamah	Meudang Ara	Blangpidie
5	UD. Siti Aminah	Siti Aminah	Meudang Ara	Blangpidie
6	UD. Sukardi S	Sukardi S	Meudang Ara	Blangpidie
7	UD. Mailinda	Mailinda	Meudang Ara	Blangpidie
8	UD. Misbah	Misbah	Meudang Ara	Blangpidie
9	UD. Yusnidar	Yusnidar	Meudang Ara	Blangpidie
10	UD. Rahmi Dewinta	Rahmi Dewinta	Meudang Ara	Blangpidie
11	UD. T. Teguh Nabawi	T. Teguh Nabawi	Pasar Blangpidie	Blangpidie
12	UD. Darwana	Darwana	Glp. Payong	Blangpidie
13	UD. Asma Ali	Asma Ali	Glp. Payong	Blangpidie
14	UD. Nurismi	Nurismi	Glp. Payong	Blangpidie
15	UD. Yunidar NY	Yunidar NY	Glp. Payong	Blangpidie
16	UD. Lismawati	Lismawati	Glp. Payong	Blangpidie
17	UD. Muwarni	Muwarni	Gadang	Susoh
18	UD. Raisah	Raisah	Gadang	Susoh
19	UD. Yusnianti	Yusnianti	Panjang Baru	Susoh
20	UD. Novi Susanti	Novi Susanti	Panjang Baru	Susoh
21	UD. Hasriadi	Hasriadi	Rumah Panjang	Susoh
22	UD. Mardiaty	Mardiaty	Padang Panjang	Susoh
23	UD. Titin Mulyana	Titin Mulyana	Tengah	Susoh
24	UD. Helvida	Helvida	Pulau Kayu	Susoh
25	UD. Missaheri	Missaheri	Pulau Kayu	Susoh
26	UD. Sri Rahayu	Sri Rahayu	Kepala Bandar	Susoh
27	UD. Gusmanuli	Gusmanuli	Suak Labu	Tangan-Tangan
28	UD. Yusniar S	Yusniar S	Lhang	Setia
29	UD. Rendi Eka Saputra	Rendi Eka Saputra	Teungah	Kuala Batee
30	UD. Risna	Risna	Alue Seulaseh	Jeumpa
31	UD. Mimi Susanti	Mimi Susanti	Alue Seulaseh	Jeumpa
32	UD. Syarifah Misdar	Syarifah Misdar	Cot Mane	Jeumpa

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Ka. Aceh Barat Daya Tahun 2020

2. Indikator Kinerja “**Cabang Olahraga yang Berprestasi**” dengan target 7 cabang dengan realisasi sebanyak 8 cabang olahraga yang berprestasi selama tahun 2019, hal ini berdampak pada pencapaian target indikator kinerja yang tergolong **Sangat Baik** yaitu sebesar 114,29%.

Peningkatan jumlah cabang olahraga yang berprestasi ini tidak terlepas dari usaha pemerintah dalam melakukan pembinaan dan mengadakan kegiatan-kegiatan pemcarian bibit-bibit baru para atlit olahraga seperti turnamen bola kaki dan bulu tangkis.

Tabel 3.33
Cabang Olahraga Berprestasi di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Cabang Olahraga	Prestasi			Ket
		Emas	Perak	Perunggu	
1	Anggar		1		Kejurnas
2	Atletik	1			O2SN Prov
3	Balap Motor		1		Kejurnas
4	Bulu Tangkis		1		Kejurda (Tingkat Provinsi)
5	Karate			1	
6	Panjat Tebing				
7	Selam	1			Kejurda (Tingkat Provinsi)
8	Silat	1			Kejurda (Tingkat Provinsi)
9	Sepak Bola			1	Divisi III PSSI (Aceh)
10	Tarung Derajat				
11	Voli Ball				
12	Basket				
13	Tenis Meja				
14	Tenis Lapangan				
15	Catur				
16	Sepak Takrau				

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

3. Indikator Kinerja **Persentase OKP yang Aktif** dengan target 45% jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang aktif, sepanjang tahun 2019 tidak terjadi kenaikan persentase jumlah OKP yang aktif yaitu tetap pada angka 45%. Jadi pada indikator ini tingkat capaian kinerjanya terukur pada kategori baik sebesar 100%.

Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang pembentukannya didasari atas kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi pemuda berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

OKP merupakan mitra strategis pemerintah dalam berbagai kegiatan, sehingga keberadaan dan keaktifan OKP yang berjalan sesuai dengan jalurnya akan sangat

membantu pemerintah/pemerintah daerah dalam mewujudkan program/kegiatan untuk kepentingan publik. Berdasarkan data, jumlah OKP yang terdaftar/melaporkan keberadaannya pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal ini melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebanyak 20 OKP dengan 9 OKP yang aktif atau 45% dari OKP yang ada. Aktifnya OKP tersebut dilihat dengan laporan kegiatan yang diberikan dan adanya laporan pergantian pengurus yang senantiasa disampaikan kepada pemerintah daerah.

Jumlah OKP yang terdaftar/melaporkan keberadaannya dan aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Daftar Organisasi Kepemudaan Aktif
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Nama Organisasi Kepemudaan	Ketua	No. Pendaftaran dan Tgl. Pendaftaran	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia	Nasli S.Ag.	220/231/2005 29 November 2005	Jl. Kesehatan No. 52 Blangpidie
2	Gerakan Muda - FKPPi	T. Rinaldi, S.Sos.I.	220-11-12- 0003/2013 18 November 2013	Jl. Persada Blangpidie
3	Komite Nasional Pemuda Indonesia	Afzal, S.H.	220-11-12- 0003/2013 25 Nov 2013	Jl. Ramli Sa'adi Kuta Tuha
4	Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI)	Tgk. Nasruddin	220-11-12- 0001/2014 14 Mei 2014	Jl . Cot Setui (Komplek Dayah Bustanul Huda) Blangpidie
5	Organisasi Pelajar Islam (OPI)	Al-Hafidh Rahman	220-11-12- 0001/2014 14 Mai 2014	Jl . Cot Setui (Komplek Dayah Bustanul Huda). Blangpidie
6	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Romi Syahputra	220-11-12- 0004/2014 11 Juni 2014	Jl. Iskandar Muda No. 36 Blangpidie
7	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	Mursalin	220-11-12- 0009/2014 10 Agustus 2014	Jl. Nasional No. 89 Padang Baru Susoh
8	Pemuda Muhammadiyah	Muslim Abdya Kamal S.Ag.	220/191/2017 21 Agustus 2017	Komp. Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Blangpidie
9	Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila	Silman Aliza	220/237/2017 2 Oktober 2017	Gampong Kuta Tinggi Blangpidie

Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Aceh Barat Daya Tahun 2020

- Misi 9 : Meningkatkan Kreatifitas Kepemudaan dan Kebijakan yang Responsif Gender
- Tujuan 2 : Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 15	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan di Aceh Barat Daya	1. Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Struktural	36%	37%	102,77	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Capaian				102,77	Sangat Baik

Sepanjang tahun 2019, Pencapaian sasaran strategis “**Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan di Aceh Barat Daya**” **Sangat Baik** yaitu sebesar 102,77%, hal ini dapat diukur pada indikator kinerja “**Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Struktural**” dari target 36% keterwakilan perempuan dari seluruh jabatan struktural yang ada dilingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya, dari data SKPK yang bertanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja indikator ini diperoleh bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan struktural bahkan lebih dari target yaitu 37%. Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat capaian **Sangat Baik** yaitu sebesar 102,77%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Misi 1 : Mengimplementasikan Nilai-nilai Keislaman dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat serta Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam

Tujuan 1 : Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Islami dan Berbudaya Keacehan melalui Pelaksanaan Syariat Islam dalam Semua Aspek Kehidupan

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terinternalisasi nya Nilai-nilai Keislaman dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya	1. Angka Pelanggaran Qanun yang Ditangani	13 Kasus	18 Kasus	n/a
	2. Jumlah Penerimaan ZIS	Rp3.362.963.894	Rp3.051.349.821	n/a
	3. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam	n/a	90%	n/a
	4. Jumlah Dayah yang Terakreditasi	46	39 Dayah	n/a
	5. Peningkatan Jumlah Hafidz dan Hafidzah	n/a	6 Orang	n/a

Tujuan 1 : Membangun Tatahan Kehidupan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Islami dan Berbudaya Keacehan Melalui Pelaksanaan Syariat Islam dalam Semua Aspek Kehidupan

Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Meningkatnya Peran Pelaku Seni dan Pelaksanaan Kehidupan Adat dalam Mendukung Pembangunan Masyarakat di Aceh Barat Daya	1. Persentase Jumlah Sanggar Seni yang Aktif	28,99%	40%	100%

Dari 1 (satu) indikator pada misi 1 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : Indikator 1 memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya, namun tidak terdapat dalam target pada RPJMK.

- Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat Daya yang Baik, Bersih dan Berwibawa untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat, Berkualitas dan Berkeadilan Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (>50)	43,27	43,60	87,2%
	2. Nilai Rata-rata Capaian SPM Kabupaten	56,91%	55,27%	111,85%
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	79,27%	74,67%	
	- Dinas Kesehatan	54,50%	32,73%	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53,08%	27,97%	
	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	46,83%	72,34%	
	- Satpol PP dan WH	100%	68,63%	
	- Dinas Sosial	7,8%	0%	
	3. Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,3%	22,51%	225%
	5. % Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	75,86%	89%	n/a

	6	% Usulan Musrenbang yang Terealisasi dalam Rencana Anggaran Kabupaten	72,22%	36,33%	n/a
	7	Nilai Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	n/a

Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syari'ah

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	1. Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian	204.154,72 Ton	202.154.75 Ton	98,70%
	2. Meningkatkan Produktivitas Hasil Pertanian	8,27 Ton/Ha	8 Ton/Ha	80%
	3. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	n/a	32.114 Ton	99,47%
	4. Meningkatkan Luas Lahan Perkebunan	27.491 Ha	28.576 Ha	n/a
	5. Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan	1.102.972 Kg	1.214.440 Kg	182,19%
	6. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan	13.863 Ton	14.932 Ton	82,60%

Tujuan 2 : Mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 5	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Mewujudkan Kemudahan Akses Permodalan dan Pasar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	1. Prosentase Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi	n/a	4,74%	n/a
	2. Prosentase Koperasi Aktif	n/a	29%	88,65%

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran Strategis 6	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terwujudnya Pembangunan Kawasan Ekonomi Agro-Maritim dan Tumbuhnya Sentra-sentra Industri Pengolahan dalam Rangka Menciptakan Lapangan Kerja Baru	1. Jumlah BUMG yang Memiliki Kapasitas untuk Mengelola Usaha-usaha Pasca Panen	3 Gampong	3 Gampong	20%
	2. Jumlah Kunjungan Wisatawan	54 Orang	75 Orang	n/a
	3. Prosentase Penurunan Angka Kemiskinan	n/a	16,29%	n/a
	4. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,16	4,30%	45,26%

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis 7	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terwujudnya Konsep	1. Peningkatan Panjang Jalan	19.346 M	8.500 M	n/a

Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Mendukung Pembangunan Infrastruktur Strategis	dalam Kondisi Baik			
	2. Luas Layanan Daerah Irigasi Teknis Kabupaten	3.040 Ha	973,23 Ha	27,80%
	3. Rasio Panjang Jalan Kabupaten Per jumlah Kendaraan	341 Unit/KM	39 Unit/KM	n/a

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis 8	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terwujudnya Pembaharuan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Barat Daya	1. Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dengan RTRW	6%	5%	n/a

Misi 5 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur sesuai Kebutuhan Wilayah sebagai Akses Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Sasaran Strategis 9	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terlaksananya Pengelolaan Sektor SDA Sesuai Peruntukan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	1. % Korban Bencana yang Menerima Bantuan Tanggap Darurat	80%	63, 63%	63,63%

- Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Memberikan Dukungan Maksimal terhadap Pendidikan Formal dan Informal
- Tujuan 1 : Menyelenggarakan Pendidikan Formal, Non-Formal dan Informal Berbasis Konsep Pendidikan Islami yang Meningkatkan Relevansi, Kualitas, Tata Kelola, dan Aksesibilitas Pendidikan di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terlaksananya Pengelolaan Sektor SDA Sesuai Peruntukan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Angka Rata-rata Lama Sekolah			
	1. Angka Partisipasi Murni			
	a. SD/MI	77,05%	82,00%	84,42%
	b. SMP/MTs	62,86%	62,97%	76,07%
	2. Angka Partisipasi Kasar			
	a. SD/MI	87,53%	88,33%	81,54%
	b. SMP/MTs	85,47%	85,12%	86,54%
	3. Angka Melek Huruf	97,12%	97,12%	98,20%
	4. Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Islami	n/a	19,71%	n/a
	5. Angka Kelulusan			
	a. SD/MI	100%	100%	369,13%
	b. SMP/MTs	99,59%	93,72%	156,53%

- Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas untuk Mewujudkan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Sehat
- Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 11	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Mampu Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh Barat Daya	1. Umur Harapan Hidup	64,51 Tahun	64,51 Tahun	100,20%
	2. Angka Kematian Bayi Per 1.000 LH	12	4	n/a
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1.000 LH	2	1	n/a
	4. Kasus Gizi Buruk	0	0	n/a
	5. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	12 Unit	1 Unit	n/a

Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial

Tujuan 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial Di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 12	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Tersedianya Kebutuhan untuk Masyarakat Rentan Terkait Pangan, Perumahan, Air Bersih, Energi, Santunan Melahirkan dan Bantuan Hukum	1. Panjang Saluran Lingkungan yang Dibangun	9.794,85 M	8.178,13 M	n/a
	2. Persentase Cakupan Layanan Rumah Tangga yang Memanfaatkan Energi Listrik	n/a	99%	n/a

Misi 8 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial

Tujuan 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Rentan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Sosial Di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 13	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terpenuhinya Jaminan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Aceh Barat Daya	Jumlah Masyarakat Penerima Bantuan Sosial			
	1. Disabilitas	110 Orang	102 Orang	n/a
	2. Fakir Miskin	11.832 Orang	11.752 Orang	n/a
	3. Anak Yatim/ Yatim Piatu	2.979 Orang	2.789 Orang	n/a

Misi 9 : Meningkatkan Kreatifitas Kepemudaan dan Kebijakan yang Responsif Gender

Tujuan 1 : Membentuk Generasi Muda Aceh Barat Daya yang Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat, Berjiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, dan Berjiwa Kebangsaan

Sasaran Strategis 14	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Terwujudnya Pemuda Aceh Barat Daya yang	1. Jumlah Wirausaha Muda	6 Orang	32 Orang	n/a
	2. Cabang Olahraga	5 Cabang	16 Cabang	n/a

Mandiri, Aktif dan Berprestasi	yang Berprestasi			
	3. Persentase OKP yang Aktif	45%	45%	n/a

Tujuan 2 : Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 15	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Capaian Akhir Tahun 2019 Dengan Target 5 Tahunan
Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan di Aceh Barat Daya	1. Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Struktural	36%	37%	

D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional

Berdasarkan indikator kinerja yang diperjanjikan, tidak semua indikator kinerja yang memiliki perbandingan dengan standar nasional. Berikut ditampilkan indikator-indikator yang dapat diperbandingkan dengan standar nasional.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat Daya yang Baik, Bersih dan Berwibawa untuk Mendukung Pelayanan Publik yang Mudah, Cepat, Berkualitas dan Berkeadilan Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran Strategis 3	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Nasional
Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Efektif dan Efisien dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (>50)	43,60	64,61
	4. Nilai Rata-rata Capaian SPM Kabupaten	55,27%	n/a
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74,67%	n/a
	- Dinas Kesehatan	32,73%	n/a
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27,97%	n/a
	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	72,34%	90%
	- Satpol PP dan WH	68,63%	85%
	- Dinas Sosial	0%	n/a

	3.	Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
	4.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22,51%	n/a
	5.	% Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	89%	n/a
	6	% Usulan Musrenbang yang Terealisasi dalam Rencana Anggaran Kabupaten	36,33%	n/a
	7	Nilai Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 3 indikator kinerja yang ada dalam standar nasional, namun hanya 1 yang mampu dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu pada indikator Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat WTP.

Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah serta Memfasilitasi Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah

Tujuan 1 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Riil Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran Strategis 4	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Nasional
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Sektor Pertanian, Kelautan dan Kehutanan	1. Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	202.154.75 Ton	n/a
	2. Meningkatnya Produktivitas Hasil Pertanian	8 Ton/Ha	n/a
	3. Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	32.114 Ton	n/a
	4. Meningkatnya Luas Lahan Perkebunan	28.576 Ha	20.000 Ha
	5. Meningkatnya Produksi Hasil Peternakan	1.214.440 Kg	n/a
	6. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Kelautan	14.932 Ton	n/a

Dari 6 indikator yang terdapat pada misi 3 tujuan, hanya 1 (satu) indikator yang selaras dengan target nasional yaitu pada indikator 4 (empat), dan capaian pada indikator tersebut telah mampu dilampaui oleh Pemkab Aceh Barat Daya pada tahun 2019.

- Misi 6 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Memberikan Dukungan Maksimal terhadap Pendidikan Formal dan Informal
- Tujuan 1 : Menyelenggarakan Pendidikan Formal, Non-Formal dan Informal Berbasis Konsep Pendidikan Islami yang Meningkatkan Relevansi, Kualitas, Tata Kelola, dan Aksesibilitas Pendidikan di Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 10	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Nasional
Terlaksananya Pengelolaan Sektor SDA Sesuai Peruntukan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Angka Rata-rata Lama Sekolah		
	1. Angka Partisipasi Murni		
	c. SD/MI	82,00%	84,52%
	d. SMP/MTs	62,97%	73,70%
	2. Angka Partisipasi Kasar		
	c. SD/MI	88,33%	99,92%
	d. SMP/MTs	85,12%	83,61%
	3. Angka Melek Huruf	97,12%	96,59%
	4. Persentase Sekolah yang Menerapkan Pendidikan Islami	19,71%	n/a
	5. Angka Kelulusan		
	c. SD/MI	100%	n/a
	b. SMP/MTs	93,72%	n/a

Dari tabel di atas pada misi 6 tujuan 1 dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari 5 indikator yang ada, terdapat tiga indikator yang selaras dengan target nasional; dan
2. Dari 3 indikator yang selaras dengan target nasional, 2 (dua) indikator telah melebihi target nasional, yaitu pada indikator angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs dan pada indikator angka partisipasi kasar SD/MI dan SMP/MTs.

- Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas untuk Mewujudkan Masyarakat Aceh Barat Daya yang Sehat
- Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Aceh Barat Daya

Sasaran Strategis 11	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Target Nasional
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan yang Mampu Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat Aceh Barat Daya	1. Umur Harapan Hidup	64,51 Tahun	n/a
	2. Angka Kematian Bayi Per 1.000 LH	4	124
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1.000 LH	1	124
	4. Kasus Gizi Buruk	0	17%
	5. Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi	1 Unit	n/a

Dari tabel di atas pada misi 7 tujuan 1 dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari 5 indikator yang ada, terdapat tiga indikator yang selaras dengan target nasional;
2. Dari 5 indikator yang ada, 3 diantaranya merupakan indikator dengan progres negatif (indikator 2, 3 dan 4) yang artinya, semakin rendah realisasi, maka capaian akan semakin baik; dan
3. Dari 3 indikator yang selaras dengan target nasional, semua indikator tersebut telah melebihi target nasional.

E. Analisis Capaian Kinerja

a. Penyebab Keberhasilan

- Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan karena adanya komitmen dari setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat Daya dalam mengimplementasikan setiap program dan kegiatan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja dengan baik;
- Adapnya perbaikan dan komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan perolehan nilai AKIP dengan cara memperbaiki berbagai kekurangan yang ada berdasarkan petunjuk dari Kemenpan dan RB dan juga dari Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan.

b. Penyebab kegagalan

- Kegagalan atas beberapa pencapaian kinerja terjadi akibat belum selarasnya setiap program/kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah dalam mewujudkan kegiatan tersebut.
- Belum semua kekurangan yang terdapat pada hasil evaluasi dari Kemenpan dan RB serta BPKP dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
- Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja secara umum masih dalam tataran *output*.

c. Upaya perbaikan

- Meningkatkan koordinasi antara sesama para kepala SKPK dan pimpinan daerah dalam rangka mewujudkan capaian target yang telah ditetapkan;
- Melakukan evaluasi berkala (triwulan/semesteran) kepada setiap SKPK untuk menilai sejauh mana penerapan SAKIP di lingkungan SKPK masing-masing;
- Memperbaiki indikator kinerja dari bertataran *output* menjadi bertataran *outcome*; dan
- Menyelaraskan setiap program/kegiatan dengan sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMK dan IKU masing-masing instansi.

F. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Bupati Aceh Barat Daya telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.080.992.278.221,00,- dengan struktur anggaran sebagai berikut :

I. PENDAPATAN		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp88.285.549.681,00
2.	Dana Perimbangan	Rp631.736.680.000,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp258.705.498.128,00
Jumlah		Rp978.727.727.809,00

II. BELANJA		
1.	Belanja Langsung	Rp520.666.331.497,00
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp560.325.946.724,00
Jumlah		Rp1.080.992.278.221,00

III. PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp104.264.550.412,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp2.000.000.000,00
Jumlah		Rp102.264.550.412,00

Dalam perjalanannya, terjadi perubahan anggaran tahun 2019 dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan sehingga perlu dilakukan penggeseran antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan darurat dan keadaan luar biasa yang ditetapkan dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun 2019.

Secara lebih terinci rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah perubahan pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.43 di bawah ini:

Tabel. 3.35
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan
(APBK-P) Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pendapatan Aceh Barat Daya			
1	Pendapatan Asli Daerah	88.541.383.069,00	90.348.940.272,37	102,04
2	Dana Perimbangan	631.736.680.000,00	616.293.166.060,00	98,23
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	258.705.498.128,00	282.676.619.633,58	108,79
Jumlah		978.727.727.809,00	989.318.725.965,99	101,39

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%
PEMBIAYAAN ACEH BARAT DAYA				
1.	Penerimaan Pembiayaan	166.445.759.823,55	166.437.359.823,55	99,99
2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00
Jumlah		164.445.759.823,55	164.437.359.823,55	99,99

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten menunjukkan tingkat capaian yang lebih optimal dengan realisasi anggaran pendapatan mencapai sebesar Rp978.727.727.809,00 atau sebesar 101,39% dari target yang direncanakan sebesar Rp989.318.725.965,99,-. Sedangkan realisasi anggaran pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp164.445.759.823,55,- dapat direalisasikan 99,99% atau sebesar Rp164.437.359.823,55,-.

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan kabupaten tahun 2019, realisasi anggaran belanja kabupaten yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung secara rinci sebagaimana tertera pada tabel 3.44 di bawah ini :

Tabel3.36
Realisasi Anggaran Belanja Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Langsung	565.438.273.621,55	478.611.420.047,00	84,64
2.	Belanja Langsung	574.756.561.692,00	524.025.200.072,95	91,17
Jumlah		1.140.194.835.313,55	1.002.636.620.119,95	87,94

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Tahun 2020

Berdasarkan komposisi anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun 2019 dengan jumlah Rp1.140.194.835.313,55,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp565.438.273.621,55,- dengan realisasi sebesar Rp478.611.420.047,00,- atau 84,64% dan belanja langsung sebesar Rp574.756.561.692,00,- dengan realisasi sebesar Rp524.025.200.072,95,- atau sebesar 91,17%.

Perkembangan dan realisasi APBK serta persentase daya serap anggaran setiap tahun tidak sama, namun rata-rata realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun belakang mencapai 84,56%, secara rinci sebagaimana tertera dalam tabel 3.45 berikut :

Tabel 3.37
Jumlah dan Realisasi APBK dalam Kurun Waktu 2015-2019

No.	Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten		Persentase
		Anggaran	Realisasi	
1.	2015	1.038.642.540.647,51	871.309.775.607,00	83,88
2.	2016	1.224.428.806.902,32	1.104.567.548.238,00	90,21
3.	2017	1.060.189.063.730,00	938.574.887.162,27	88,52
4.	2018	1.131.157.175.062,00	814.001.631.138,11	71,96
5.	2019	1.140.194.835.313,55	1.002.636.620.119,95	87,93
Total		5.594.612.421.655,38	4.731.090.462.265,33	84,56

Sumber : Badan Keuangan Kabupaten Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.45 kemampuan daya serap APBK tahun 2019 mencapai 87,93%. Tingkat pencapaian realisasi anggaran yang relatif baik tersebut lebih kecil dari tingkat capaian kinerja rata-rata yang mencapai 128,20%. Tingkat capaian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi lebih efisien dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, sejalan dengan adanya perbaikan dalam sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan yang sinergi sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yang berbasis pada kinerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan kinerja pemerintah yang disusun atas dasar capaian kinerja tahunan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab atas penggunaan anggaran yang diberikan dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik agar sesuai dengan ekspektasi publik.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 merupakan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap 15 sasaran strategis dan 48 indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan membandingkan realisasi dan target kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2019 dapat dikategorikan **Sangat Baik** dengan nilai rata-rata sebesar **128,20 %**. Rata-rata nilai capaian kinerja dimaksud dibandingkan dengan persentase capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar **87,93%**. Hal ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berbasis kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah merupakan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017-2022 telah menunjukkan hasil yang signifikan.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pencapaian kinerja secara akumulatif, belum diikuti dengan tingkat pencapaian yang optimal pada setiap indikator kinerja. Hal ini disebabkan masih adanya hambatan/kendala dalam pencapaian beberapa indikator kinerja, antara lain penerapan Sistem Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis kinerja yang belum optimal, sistem pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi sumber daya aparatur yang masih rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang ikut mempengaruhi dalam pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis, program dan kegiatan pembangunan Aceh Barat Daya.

B. Langkah-Langkah Perbaikan

Dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan, yaitu :

1. Menyelaraskan antara perjanjian kinerja masing-masing perangkat daerah dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
2. Memperbaiki indikator kinerja perangkat daerah agar berbasis hasil (*outcome*) dan tidak berbasis keluaran (*output*).
3. Agar setiap perangkat daerah meningkatkan capaian program di instansi masing-masing dalam rangka mewujudkan target yang telah ditetapkan dalam RPJMK Tahun 2018-2022; dan
4. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi masing-masing perangkat daerah dalam mewujudkan pencapaian kinerja; dan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun kami sangat menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan untuk perbaikan di masa yang akan datang.